

## BAB 2

### BIOGRAFI KHAIRUDDIN AT-TUNISI DAN LATAR SEJARAH SAAT KHAIRUDDIN HIDUP

#### 2.1 Keluarga dan Masa Muda Khairuddin At-Tunisi

Khairuddin adalah orang Syarkasi<sup>28</sup> yang diculik ketika masih kecil entah pada saat terjadi penyerangan oleh musuh ke kampungnya atau pada saat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang Syarkasi merupakan orang dari suku badui yang sering berpindah-pindah tempat tinggalnya.

Orangtua Khairuddin tewas dalam pertempuran antara Rusia dengan kerajaan Turki Utsmani<sup>29</sup> sehingga dia hidup sebatang kara tanpa ayah dan ibu. Tidak diketahui dari sumber mana pun informasi atau data mengenai orang tua atau keluarga Khairuddin. Khairuddin menjadi budak sejak kecil dan dijual di pasar budak Istanbul, Turki.<sup>30</sup> Dia dibeli oleh seorang bangsawan Turki yang terkenal, Tahsin Bek. Kemudian Tahsin Bek menjualnya kembali dan dia dibeli oleh seseorang yang mengantarkannya ke kediaman Ahmad Pasya yang pada saat itu Ahmad Pasya belum menjadi Bey Tunisia. Ketika dibawa ke rumah Ahmad Pasya, usia Khairuddin baru menginjak 17 tahun.<sup>31</sup>

Telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa Khairuddin telah menjadi pekerja kasar (budak) sejak kecil sehingga masa muda Kahiruddin tidak seperti masa-masa muda yang dilalui oleh kebanyakan pemuda seusianya. Beruntunglah dia dapat tinggal dan bekerja di

---

<sup>28</sup> Orang Syarkasi menempati pegunungan sebelah Barat Laut dari Laut Qazwain dan sebagian dari pantai Laut Hitam. Tetapi setelah Rusia menduduki negeri mereka, maka mereka bercerai-berai. Sebagian besar dari mereka lari ke Turki atau Asia Kecil. Orang-orang Syarkasi pernah menduduki jabatan-jabatan penting dalam angkatan perang di Mesir dari tahun 724-932 H (Lihat buku A. Mukti Ali dalam kepustakaan)

<sup>29</sup> Peneliti mendapatkan sumber data dari Kedutaan Besar Tunisia di Jalan Karang Asem, Jakarta Selatan, pada tanggal 10 Maret 2009 atau lihat [www.arabslink.net](http://www.arabslink.net).

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

kediaman Ahmad Pasya di mana Ahmad Pasya menganggapnya sebagai orang dekatnya.<sup>32</sup> Maka Bey Ahmad Pasya merupakan keluarga bagi Khairuddin. Ketika datang di kediaman Bey Ahmad Pasya, dia mempunyai latar belakang tidak berpendidikan karena pekerjaannya sebagai budak. Dia membaca buku-buku yang ada di perpustakaan Bey Ahmad Pasya. Kegemarannya membaca buku terutama buku-buku sejarah, filsafat, sains, dan buku-buku yang ada di perpustakaan Bey Ahmad Pasya membuat Khairuddin memiliki wawasan yang luas.<sup>33</sup> Dia juga berbeda dengan orang-orang seusianya. Kesukaanya berkumpul dengan para ahli politik dan hukum menjadi kelebihan Khairuddin. Dia menjadi orang yang suka melakukan observasi sebagaimana orang-orang lain yang melakukan hal yang sama.<sup>34</sup>

Sebagai orang dekat Bey Ahmad Pasya, Khairuddin terkadang dipercayakan dan ditugaskannya dalam pemerintahan. Khairuddin pernah mengurus masalah korupsi yang dilakukan Ibnu Iyad yang melarikan diri ke Prancis.<sup>35</sup> Selain itu, dia juga mendapat tugas untuk menjual batu-batu mulia dalam rangka mencari dana untuk keperluan perang Cremia tahun 1853. Pada saat itu Ahmad Pasya telah menjadi Bey Tunisia.<sup>36</sup>

Khairuddin tidak bergabung dengan organisasi apapun selain karena dia selalu mendampingi Ahmad Pasya ketika bertugas juga pada saat itu tidak ada satu organisasi kepemudaan di Tunisia. Ahmad Pasya berharap kelak Khairuddin akan membantu Ahmad Pasya dalam pemerintahan. Khairuddin bukan termasuk orang yang suka berpangku tangan. Walaupun dia hidup dalam lingkungan yang serba berkecukupan bahkan lebih, tidak membuatnya malas dan suka mengumpulkan harta lagi boros.<sup>37</sup> Kehidupan di masa lalu dan wataknya sebagai orang Syarkasi membuat Khairuddin tidak mudah tenggelam dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Hamdan, *Op. Cit.*, hal. 26.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 80.

<sup>35</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 197.

<sup>36</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 198.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 196.

kemewahan. Kepercayaan dan tugas-tugas yang diberikan Ahmad Pasya kepadanya adalah ilmu yang tidak ternilai harganya selain membaca buku dan mendapatkan pendidikan formal. Kelak ilmu tersebut menjadi bekalnya melakukan birokrasi dengan pejabat-pejabat kerajaan Turki Utsmani dan perbaikan dalam pemerintahan. Dalam pandangan Mustafa Khaznadar, Khairuddin merupakan seorang pemuda yang mempunyai masa depan yang gemilang sehingga dia menikahkan putrinya dengan Khairudddin.<sup>38</sup>

## 2.2 Pendidikan Khairuddin Al-Tunisi

Keadaan Tunisia pada saat Khairuddin dibawa ke negeri itu seperti keadaan negara-negara Timur yang lain, menyanggah suatu kebudayaan yang sudah tua.<sup>39</sup> Kaum Muslimin juga berada dalam kemunduran sehingga terjebak dalam kejumudan yang tidak jauh dari bid'ah.<sup>40</sup> Penduduknya tidak bisa membaca dan menulis karena madrasah-madrasah hanya mengajarkan pelajaran Al-Quran, tetapi itu pun sekedar menghafal ayat-ayatnya saja tanpa mengetahui arti dan maknanya.<sup>41</sup> Refomasi militer yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II merupakan gerbang awal pendidikan formal di Tunisia. Sultan Mahmud II memerintahkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani termasuk Tunisia untuk melakukan pembaharuan di bidang militer. Pada awalnya, pembaharuan militer di Tunisia hanya membentuk kelompok kecil tentara, namun ketika pemerintahan Bey Ahmad Pasya mulai terlihat perkembangan yang signifikan yaitu dibangunnya sekolah militer. Dalam bidang pendidikan, Khairuddin mendapatkan dua macam pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal yang didapat Khairuddin adalah pendidikan militer di Sekolah Militer Bardo dan melanjutkan ke

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 190.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 191.

<sup>41</sup> *Ibid.*

sekolah militer di Prancis. Sedangkan pendidikan non-formal yang didapat Khairuddin adalah pendidikan yang diperoleh dari Masjid

### 2.2.1 Pendidikan Formal

Sultan Mahmud II memerintah kerajaan Turki Utsmani dari tahun 1808 sampai tahun 1839. Reformasi yang dilakukan adalah kelanjutan dari reformasi yang dilakukan oleh Sultan Mustafa IV. Pada tahun 1826, Sultan Mahmud II melakukan usaha-usaha pembaharuannya sendiri dalam pemerintahan terutama di bidang militer. Kemudian Sultan Mahmud II mengirimkan surat perintah kepada negara-negara kekuasaannya untuk mengadakan pembaharuan juga dalam pemerintahan terutama di bidang militer.<sup>42</sup> Namun, di sini terdapat perbedaan menggunakan pelatih militer. Sultan Mahmud II meminta Muhammad Ali Pasya dari Mesir<sup>43</sup> dan tidak mau mengambil pelatih dari Eropa. Sedangkan Ahmad Bey Pasya meminta bantuan kepada Prancis untuk mengirimkan pelatihnya.<sup>44</sup>

Ketika Ahmad Pasya menjadi Bey Tunisia, dia juga melakukan modernisasi militer dengan mendirikan sebuah sekolah militer dengan mengambil pelatih-pelatih dari Prancis.<sup>45</sup> Sejak itu, Khairuddin ikut bergabung di sekolah militer tersebut. Sekolah militer itu adalah Sekolah Militer Bardo. Sekolah Bardo dibuka sampai Bey Muhammad Tunis memerintah.<sup>46</sup> Sekolah Militer Bardo didisain untuk mempersiapkan tingkatan-tingkatan dalam ketentaraan dan administrasi. Sekolah ini terbagi menjadi enam sampai sembilan tahun mendapatkan pelatihan modern yang dilatih oleh pelatih Prancis.<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hal. 194.

<sup>43</sup> Nasution, hal. 90.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 194.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Stearns, *Op. Cit.*, hal. 549

<sup>47</sup> Y. G. M. Lulat, *A History of African Higher Education From Antiquity to The Present: A Critical Synthesis* (Greenwood Publishing Group, 2005), hal. 169.

Orang Syarkasi senang sekali mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan ketentaraan atau kemiliteran karena mereka terkenal dengan sifatnya yang pemberani dan selalu menguasai bidang ini. Oleh karena itu Khairuddin senang sekali dapat mengikuti pelatihan di sekolah militer Bardo. Di Sekolah ini, dia menjadi komandan regu kavaleri dan secara perlahan-lahan naik pangkat menjadi komandan batalion kavaleri pada tahun 1852. Pada saat itu, Khairuddin berusia 42 tahun. Walaupun usianya tidak muda lagi, dia tidak pernah lelah dan pantang menyerah karena sifatnya yang disiplin dan kokoh pendirian. Khairuddin adalah orang yang mempunyai kemauan keras dan cepat menyelesaikan masalah.

Selain itu, karena pencapaiannya yang luar biasa di sekolah militer itu, Bey Ahmad Pasya mengirimnya ke Paris, Prancis, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Dia tinggal di Paris, Prancis, selama empat tahun. Selama itu pula dia juga banyak membaca buku-buku hukum, filsafat, dan politik selain mendalami pengetahuan kemiliteran. Selama tinggal di Prancis, Khairuddin mempelajari bagaimana Prancis menghadapi berbagai masalah. Dia juga mempelajari pemerintahan Prancis dan bertukar pikiran dengan para politikus Prancis.<sup>48</sup>

Pengiriman duta-duta ke Prancis baik yang dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani<sup>49</sup> maupun Tunisia bertujuan untuk mempelajari kemajuan pengetahuan dan teknologi di Prancis. Hal ini dikarenakan Eropa terutama Prancis sedang mengalami kemajuan pesat setelah terjadinya Revolusi Industri dan Eropa sangat terbuka dengan hal-hal yang modern.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hal . 199.

<sup>49</sup> Nasution, *Op. Cit.*, hal. 15

<sup>50</sup> Bernard Lewis, *The World of Islam: Faith, People, and Culture*, dalam *Chapter Thirteen: Islam Today* oleh Elie Kedourie (London: Thames and Hudson Ltd, 1992), hal. 332.

### 2.2.2 Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal Khairuddin didapatkan dengan belajar di Masjid Az-Zaitunah. Az-Zaitunah merupakan universitas terbesar di Tunisia dan telah eksis menjadi salah satu pusat keilmuan Islam di Afrika Utara. universitas yang sama besarnya dengan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir.<sup>51</sup> Asal-usulnya adalah dengan pengajian-pengajian yang diadakan di Mesjid Az-Zaitunah.<sup>52</sup> Pengajian-pengajian ini telah berlangsung sejak didirikannya Mesjid Az-Zaitunah. Ketika itu Tunisia diperintah oleh seorang gubernur bernama Ubaidillah al-Habhab dan pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik dari Dinasti Umayyah.<sup>53</sup> Masjid Agung Zaitunah didirikan pada abad ke-8.<sup>54</sup> Kota Tunisia tercatat sebagai pusat ilmu pengetahuan. Salah satu faktor yang mendorong kota Tunisia sebagai pusat ilmu pengetahuan adalah berpindahnya para ilmuwan Muslim Spanyol ke Tunisia. Lalu ilmuwan Muslim tersebut mengembangkan ilmunya di Tunisia, salah satunya adalah Abu Salt Umaiya (1067-1134) yang merupakan seorang dokter, matematikus, dan astronom.<sup>55</sup>

Di awal abad ke-13 Tunisia menjadi kota Tunisia menjadi mencapai puncak kejayaannya. Selain menjadi tempat untuk beribadah, masjid di kota Tunis juga merupakan pusat menimba ilmu. Di sekitar masjid terdapat universitas dan perpustakaan. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut mendorong berdirinya Universitas Az-Zaitunah. Universitas Az-Zaitunah mulai menjadi universitas berpengaruh pada abad ke-13. Di sekitar kompleks Az-Zaitunah terdapat sebuah pusat

<sup>51</sup> Hamdan, *Op. Cit.*, hal. 16.

<sup>52</sup> Dede Permana, *Tinggal di Tunisia, Belajar di Zaituna* (<http://dedepermana.blogspot.com/2007/03/tunis-studi.html>) diakses pada tanggal 6 Juli 2009, pukul 20.30 WIB).

<sup>53</sup> Di sumber lain, disebutkan bahwa gubernur ketika Masjid Az-Zaitunah didirikan adalah Ibrahim Ibnu Aghlab. Gubernur yang ditunjuk oleh Dinasti Abbasiyyah yang berpusat di kota Baghdad (Lihat Tunis: Ibu Kota Kekhalifahan di Maghrib dalam Khazanah Dunia Islam Republika Online; <http://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal 6 Juli 2009, pukul 21.00 WIB)

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

perbelanjaan. Para pedagang dari berbagai negara di dunia datang ke kota Tunis unntuk berdagang.<sup>56</sup>

Pada tahun 1534-1574, Tunisia dikuasai oleh bangsa Spanyol sehingga terjadi penjarahan besar-besaran dan pengrusakan terhadap Masjid dan Universitas Az-Zaitunah. Mereka menjarah bermacam-macam manuskrip dan buku-buku yang berharga. Akan tetapi, bangsa Spanyol dapat dikalahkan oleh kerajaan Turki Utsmani. Kemudian kerajaan Turki Utsmani memulihkan dan memperbaiki Masjid dan Universitas Az-Zaitunah.<sup>57</sup>

Khairuddin belajar di Universitas Az-Zaitunah. Di sini diajarkan Ilmu Tafsir, Hadits, Fiqih, Aqid, Ilmu Bahasa berupa Nahwu dan Sharaf, Ma'ani, dan Bayan. Selain itu Khairuddin juga belajar Ilmu Syariah dengan cara bergaul dengan para ulama di Tunisia.<sup>58</sup> Di samping itu, Khairuddin mempelajari sedikit Tauhid, Al-Qira'ah dan Al-Kitabah serta Al-Quran dan Tajwid.<sup>59</sup> Khairuddin juga mempelajari bahasa Arab, Prancis dan Turki. Pada masa kerajaan Turki Utsmani, Universitas Az-Zaitunah membuka program studi Fisika, Politik Ekonomi, dan Bahasa Prancis.<sup>60</sup>

Namun, pada saat Habib Borguiba berkuasa Universitas Az-Zaitunah dipersempit menjadi sebuah fakultas dengan nama *Kuliyah az-Zaituniyyah li as-Syariah wa Ushul ad-Din*. Jumlah mahasiswanya pun dibatasi, fasilitasnya dikurangi, hingga pada gilirannya *trend* sekolah agama menjadi tidak menarik lagi.<sup>61</sup>

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Ali, *Op. Cit*, hal. 194

<sup>59</sup> Hamdan, *Op. Cit*, hal. 25.

<sup>60</sup> Tunis: Ibu Kota Kekhalifahan di Maghrb dalam Khazanah Dunisa Islam Republika Online (<http://www.republika.co.id>) diakses pada tanggal 6 Juli 2009, pukul 21.00 WIB

<sup>61</sup> Lihat Dede permana.

## 2.3 Karir Politik

Kebiasaan berkumpul dengan para intelektual menjadi kelebihan Khairuddin. Dia menjadi orang yang suka melakukan observasi dalam melakukan sesuatu. Karakternya sama dengan karakter Ali Pasya Mubarak, seorang pembaharuan di Mesir.<sup>62</sup> Dia adalah seorang pemikir yang ingin memperbaharui sesuatu yang diawali dengan membaca artikel-artikel tentang perubahan peristiwa-peristiwa; peristiwa pemerintahan dan masyarakat.<sup>63</sup> Dari sinilah, Khairuddin melakukan pergerakan itu. Khairuddin melakukan perbaikan sampai ke akar-akarnya. Standar perbaikan yang ditawarkannya adalah standar perbaikan Eropa. Selama terjun ke dalam politik praktis, Khairuddin telah menjabat sebagai Menteri Peperangan, Ketua Majelis Syura, Ketua Komisi Keuangan, dan PM.

### 2.3.1 Menteri Peperangan (1859-1863)

Sekembalinya Khairuddin dari Prancis, dia dianugerahi pangkat Jenderal pada tahun 1858 oleh Bey Muhamaad Tunis.<sup>64</sup> Kemudian pada tahun 1859 Khairuddin diangkat menjadi Menteri Peperangan oleh Bey Muhammad Tunis.<sup>65</sup>

Ketika menjadi Menteri peperangan, Khairuddin sudah mulai melakukan pembaharuan yaitu melakukan perbaikan-perbaikan Halqul Wadi, pelabuhan terbesar Tunisia. Pelabuhan merupakan tempat yang strategis dalam pertahanan keamanan negara.<sup>66</sup>

Selain itu, Khairuddin juga memerintahkan pegawai kementeriannya untuk mencatat segala sesuatu yang dilakukan dalam kementeriannya dan peraturan semacam ini merupakan peraturan baru pertama kali ada di Tunisia. Pencatatan ini penting karena membatasi

---

<sup>62</sup> Hamdan, *Op. Cit*, hal 80

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 80.

<sup>64</sup> Ali, *Op. Cit*, hal. 193.

<sup>65</sup> *Ibid*.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 210.

pengeluaran yang tidak perlu dan merapihkan arsip-arsip yang tidak dicatat sebelumnya.<sup>67</sup>

### 2.3.2 Ketua Majelis Syura (1863-1865)

Lima tahun kemudian yaitu 1863, Khairuddin diangkat menjadi Ketua Majelis Syura atau Majelis Permusyawaratan dengan tetap menjabat sebagai Menteri Peperangan. Saat itu, Khairuddin berusia 53 tahun. Kemudian tahun 1865, Khairuddin berhenti dari Majelis Permusyawaratan atau Majelis Syura. Khairuddin termasuk orang yang tegas dalam penggunaan uang wakaf.<sup>68</sup> Anggota-anggota Majelis Syura menginginkan uang wakaf dipergunakan untuk perbaikan angkatan bersenjata yang merujuk pada fatwa seorang ulama Mazhab Maliki, tetapi Khairuddin menolak keinginan tersebut dan memberikan pendapatnya mengenai hal ini.

“Angkatan bersenjata mempunyai anggaran belanja sendiri dalam APBN dan tidak sah untuk mengambil dari uang wakaf kecuali apabila keuangan negara lumpuh dan dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang adil, tetapi apabila keuangan negara itu dibelanjakan untuk ini dan itu dan dihabiskan untuk kemewahan dan kesenangan, maka tidak sah kita minta bantuan dari harta benda wakaf.”<sup>69</sup>

Kegagalan percobaan pemerintahan konstitusional yang tidak berlangsung lama disebabkan oleh krisis keuangan, kerusuhan antar suku, tekanan dan persaingan antara Prancis dan Inggris, serta keinginan Bey Ahmad Pasya yang tetap bebas berkuasa.<sup>70</sup> Sebagai ketua Majelis Syura Khairuddin tegas dalam mengambil keputusan, mempertahankan kebenaran apabila benar, dan tidak melihat seseorang dari harta dan kedudukannya. Selama menjabat sebagai ketua Majelis Syura, Khairuddin sempat membuat kotak aspirasi rakyat yang bertujuan untuk mendengar

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 210.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Albert Hourani, *Arabic Thought in The Liberal Age, 1798-1939*, New York: Cambridge University Press, 1962, hal. 84.

aspirasi rakyat dan hanya dia yang boleh membuka kotak itu.<sup>71</sup> Hal ini seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Hanya saja ada perbedaan antara Umar bin Khattab dengan Khairuddin al-Tunisi yaitu cara mereka mengetahui nasib rakyatnya.

Pada tahun 1867, Khairuddin menulis buku yang berjudul *Aqwamul Masalik fi Ma'rifatil Ahwalil Mamalik* yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dengan judul *Reformer Necessaires aux Etats Musulmans (The Straight Path to Movement Government Reform)*. Buku ini memaparkan negara-negara Eropa tentang segala hal dalam pemerintahan dan sebab kemunduran negeri-negera Islam serta solusi memperbaikinya. Di dalam muqaddimahnya, Khairuddin menjelaskan tujuannya:

“Pertama, untuk mendorong orang-orang yang teguh dan semangat antara politikus dan ahli agama (ulama), sejauh mereka dapat, apa yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat Islam dan pengembangan peradaban seperti perluasan dari batas-batas ilmu pengetahuan dan pembelajaran serta persiapan yang mengarah ke jalan kekayaan...dasar adri semua ini adalah pemerintahan yang baik. Kedua, untuk memperingatkan orang-orang yang tidak peduli di kalangan Muslim pada umumnya dengan menutup mata mereka terhadap perlawanan atas apa yang patut dipuji dan sesuai dengan hukum agama kami dalam praktek toleransi beragama, karena mereka memiliki gagasan tetap dalam pikiran mereka bahwa semua perbuatan dan institusi Muslim tidak harus dihindari”.<sup>72</sup>

Dalam kaitannya dengan Majelis Syura, Khairuddin menghimbau agar ulama dan politisi dapat ikut berpartisipasi di dalam Majelis Syura, membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak akan pernah terjadi kesewenangan kekuasaan yang mengakibatkan ketidakadilan bagi rakyat.

### 2.3.3 Ketua Komite Keuangan (1869-1873)

Kondisi keuangan Tunisia pada tahun 1869-1873 sedang mengalami kesulitan bahkan pailit karena Mustafa Khaznadar (1861-1873) melakukan korupsi<sup>73</sup> dan tidak adanya pengaturan administrasi

<sup>71</sup> Ali, *Op. Cit*, hal. 215.

<sup>72</sup> Hourani, *Op. Cit*, hal. 88.

<sup>73</sup> Ali, *Op. Cit*, hal. 216

negara yang baik. Oleh karena itu, Komisi Internasional Inggris-Prancis mengawasi keuangan negara Tunisia dan sedikit campur tangan dalam hal keuangan Tunisia sehingga terbentuk Komite Keuangan untuk memperbaiki keuangan Tunisia dan memberikan jaminan bagi negara-negara yang meminjamkan uangnya kepada Tunisia.

Ada tiga hal yang dilakukan Khairuddin selama menjabat sebagai ketua Komite Keuangan, yaitu:<sup>74</sup>

Pertama, campur tangan negara asing diminimalisasikan bahkan ditiadakan lewat perundingan dengan negara-negara bersangkutan agar Komite itu hanya mengurus penggunaan hutang-hutang secara terbatas, mengatur APBN dan memberikan jaminan pinjaman beserta bunga pada jangka waktu yang ditetapkan kepada negara-negara kreditor.<sup>75</sup>

Kedua, membangkitkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menggerakkan ekonomi rakyat dengan meringankan pajak pertanian dan menggerakkan penanaman pohon zaitun dan kurma. Bagi setiap orang yang baru menanam zaitun dan kurmadibebaskan pajak selama 20 tahun.<sup>76</sup>

Ketiga, Mustafa Khaznadar yang pada saat itu menjabat Perdana Menteri dicopot jabatannya oleh Komite Keuangan karena terbukti korupsi, maka rakyat yang mengetahui hal ini merasa senang karena orang telah merugikan negara telah dicopot dari jabatannya.<sup>77</sup>

#### **2.3.4 Perdana Menteri (1873-1877)**

Para petani menyambut hangat usaha-usaha Khairuddin dalam membangkitkan perekonomian para petani. Tidak sedikit petani yang terbebas dari pajak yang melilit hidup para petani beberapa tahun belakangan. Selain itu, dengan peringanan pajak dan penghapusan segala

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 214.

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*.

tuntutan yang dilakukan pemerintahan lama membuat orang-orang yang dulunya meninggalkan negara kini kembali ke negara Tunisia.<sup>78</sup>

Setelah Mustafa Khaznadar dicopot jabatannya sebagai Perdana Menteri, Khairuddin dipercaya mengantikannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 1873.<sup>79</sup> Khairuddin menjadi Perdana Menteri selama empat tahun. Dengan diangkatnya Khairuddin sebagai PM, dia dapat melakukan perbaikan dan pembaharuan untuk kepentingan negara.<sup>80</sup> Adapun perbaikan-perbaikan yang dilakukan Khairuddin selama menjabat sebagai PM yaitu di bidang politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Satu persatu perbaikan-perbaikan itu membuat kondisi Tunisia membaik, sehingga orang-orang Eropa merasa khawatir dan takut dengan perkembangan kondisi sosial yang baik dari hari ke hari. Oleh karena itu, Prancis mencari cara untuk menghentikan hal tersebut dengan meminta pemberhentian Khairuddin dari jabatannya. Pemberhentiannya sebagai PM dipicu oleh ketidaksenangan para pejabat lain yang tidak menginginkan perubahan yang dilakukan Khairuddin selama menjadi PM.<sup>81</sup>

Dalam bidang politik dan hukum di antaranya mendengar tuntutan diplomat negara-negara Eropa yang masuk akal dan menolak tuntutan yang tidak masuk akal dengan alasan-alasan bijak. Lalu mempererat hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Utsmani.. Selain itu mengutus beberapa ahli hukum untuk mempelajari undang-undang di kerajaan Turki Utsmani, Eropa, dan Mesir dan mengambil bagian perundang-undangan dari negara-negara tersebut yang layak diterapkan di Tunisia. Hal ini berkaitan dengan kondisi Tunisia masih mempergunakan hukum dengan dua mazhab sekaligus yaitu Mazhab Maliki dan Hanafi.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 215

<sup>79</sup> *Ibid*, hal. 216.

<sup>80</sup> *Ibid*.

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 220-222.

<sup>82</sup> *Ibid*, hal.218.

Dalam bidang ekonomi yaitu mengatur pajak pertanian yang masuk akal dan menghapus pajak yang tidak masuk akal. Mengatur hubungan pemilik tanah dengan penggarap, pemilik tanah dengan pemerintah, dan membubarkan kesatuan-kesatuan tentara (kolektor pajak) yang digunakan untuk menarik pajak dengan kekerasan. Kemudian menaikkan pajak impor dan menurunkan pajak ekspor. Selain itu, menentukan gaji pegawai yang sesuai dan mengatur APBN Tunisia. Khairuddin juga menghidupkan kerajinan Maghribi dan melatih pemuda-pemuda untuk dilatih membuat kerajinan tersebut. Mengatur perwakafan dan mengangkat Sayid Muhammad Bairam sebagai kepala perwakafan yang dibantu oleh sebuah majelis.<sup>83</sup>

Dalam bidang pendidikan di antaranya mendirikan Universitas Sadiqi.<sup>84</sup> Lalu mengumpulkan dan mengatur kitab-kitab (buku-buku) yang berserakan serta didirikannya perpustakaan besar. Juga membenahi percetakan negara dan mempublikasikan buku-buku yang berisi ilmu dan sastra. Selain itu, Memperbaiki surat kabar resmi pemerintah yaitu *Ar-Ra'id At-Tunisi*. Rakyat dianjurkan mengisi makalah-makalah dan aspirasi-aspirasi yang berhubungan dengan politik dan pegawai pemerintahan wajib membaca surat kabar ini.<sup>85</sup>

## **2.4 Latar Sejarah Ketika Khairuddin Hidup ( 1810-1889)**

### **2.4.1 Tunisia di Bawah Kekuasaan Turki Utsmani**

Kerajaan Turki Utsmani merupakan contoh utama pendirian otoritas politik Timur Tengah yang paling besar, paling kuat, dan juga paling sulit ditekan entitas politik di Timur Tengah. Tunisia berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani sejak awal abad ke-17.

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Stearns, *Op. Cit*, hal. 550. Di sumber lain dikatakan bahwa Sadiqi merupakan sebuah sekolah modern (Lihat A. Mukti Ali dalam kepustakaan)

<sup>85</sup> Ali, *Op. Cit*, hal. 217.

Menurunnya kekuatan armada kerajaan Turki Utsmani sejak abad ke-17 melonggarkan cengkraman kekuasaan kerajaan Turki Utsmani atas provinsi-provinsi di Afrika, dan memberikan keleluasaan pada gubernur mereka, baik yang disebut Pasya, Bey, atau Dey<sup>86</sup> untuk bertindak sebagai penguasa lokal yang merdeka. Di Tunisia dan Tripoli, komandan-komandan militer menciptakan dinasti-dinasti yang diakui oleh Istanbul. Tetapi kontrol penguasa lokal tidak mencapai ke pelosok-pelosok desa. Pada abad itu pula, kekalahan-kekalahan kerajaan Turki Utsmani dengan negara-negara Eropa mendorong raja-raja dan pemuka-pemuka kerajaan Turki Utsmani menyelidiki sebab-sebab kekalahan mereka dan rahasia keunggulan negara-negara Eropa.<sup>87</sup>

Pada abad ke-18, kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran sedangkan Eropa sedang mengalami kemajuan dalam teknologi militer dan ilmu pengetahuan sehingga negara-negara Eropa mulai melirik wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Pada abad ke-18, Tunisia diperintah oleh Dinasti Husayn yang didukung militer Turki Utsmani.<sup>88</sup> Perkiraan penduduk pada waktu itu tidak kurang dari satu juta jiwa, dua pertiga dari mereka adalah yang tidak berpindah-pindah.<sup>89</sup> Sebagian besar penduduk bermatapencaharian di bidang agraris atau pertanian. Dari tahun 1807-1812 terjadi peperangan dengan Algeria, Tunisia diharuskan membayar upeti untuk memberikan sokongan peperangan. Tetapi, Bey Hammuda berusaha untuk mengakhiri pembayaran upeti tersebut. Pada tahun 1811 terjadi pemberontakan tentara kerajaan Turki Utsmani yang kemudian dimanfaatkan oleh Bey Hammuda kesempatan itu untuk mengurangi ketergantungan pada militer kerajaan Turki Utsmani dan mulai mendekati diri dengan dengan Zwawa suku barbar.<sup>90</sup> Kemudian

---

<sup>86</sup> Bey merupakan gelar penguasa lokal yang bertindak sebagai gubernur di wilayah Tunisia dan Dey merupakan gelar penguasa lokal yang bertindak sebagai gubernur di wilayah Algeria.

<sup>87</sup> Nasution, *Op. Cit*, hal. 15.

<sup>88</sup> Stearns, *Op. Cit*, hal. 547

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 548.

<sup>90</sup> *Ibid*.

tentara Dinasti Husayn telah terdiri dari Turks (keturunan prajurit kerajaan Turki Utsmani dan pejabat atau penjelaj yang direkrut di seluruh Mediterania), Zouaves (anggota sebuah suku al-Jazair Kabyle, Zwawa, yang terkenal dengan keahlian mereka sebagai prajurit), Spahis (orang Tunisia suku Horsemen), dan Hambas (perpaduan antara Turks dan orang-orang Tunisia yang menjalankan fungsi polisi).<sup>91</sup>

Ada dua hal yang dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani dalam mengatasi kemundurannya dan intervensi militer Eropa yaitu memberi pembagian kekuasaan atas beberapa wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani kepada penguasa lokal masing-masing tempat dan memperlajari kemajuan teknologi militer yang sedang dialami oleh Eropa. Memberi pembagian kekuasaan kepada penguasa lokal pada masing-masing wilayah berbeda antara penguasa lokal -seperti Bey (di Tunisia), Dey (di Algeria), dan *Khedive* (di Mesir)-, pedagang-pedagang, dan ulama lokal. Memberi tiap kelompok tersebut yang kelak akan bersifat permanen. Anak-anak pedagang dikirim ke madrasah, pegawai dan tentara juga mengirimkan anak mereka ke sana.<sup>92</sup> Ada perkawinan campuran antara orang Tunisia dan Turki yaitu *Kouloughis*.<sup>93</sup>

Pada tahun 1814-1824, Bey Mahmud meluncurkan kebijakan kenaikan pajak yang memberi dampak negatif pada produksi pertanian. Pada tahun 1818-1820 terjadi epidemik penyakit pes yang mengurangi populasi kependudukan sekitar seperempatnya. Kemudian pada tahun 1819, Bey Mahmud merancang monopoli negara akan pajak minyak zaitun. Minyak zaitun dijual kepada pemerintah dengan harga tetap dan kemudian dijual kembali untuk mengambil keuntungan dari para eksportir Eropa. Pada tahun 1824-1835 Tunisia dipimpin oleh Bey Husayn II.

---

<sup>91</sup> Kenneth J. Perkins. *A History of Modern Tunisia*, New York: Cambridge University Press, 2004, hal. 15.

<sup>92</sup> Hourani, *Op. Cit*, hal. 237.

<sup>93</sup> James Allman, *Social Mobility, Education Development in Tunisia* (New York: Brill Archive, 1979), hal. 26.

Politik ekonomi yang dijalankan selama pemerintahannya menjadikan Tunisia berada dalam belitan hutang negara-negara Eropa.<sup>94</sup>

Melihat kemajuan teknologi militer dan ilmu pengetahuan di Eropa, membuat Sultan Mahmud II melakukan reformasi dan pemerintahan terutama di bidang militer. Lalu Sultan Mahmud II mengirimkan surat perintah kepada negara-negara kekuasaannya untuk mengadakan pembaharuan pada tahun 1826.<sup>95</sup> Pada tahun 1830 terjadi perjanjian perdagangan dengan Prancis. Perjanjian itu memberikan status kepada negara Prancis dan mengakhiri monopoli dalam ekspor pertanian sebelumnya. Perdagangan Tunisia berorientasi kembali pada Eropa dan menjauh dari tanah-tanah negara Islam. Pergeseran itu mengakibatkan tanda penurunan dalam ekonomi lokal. Pada tahun 1831 Bey Husayn menciptakan sebuah tentara kecil yang didasarkan pada peraturan baru kerajaan Turki Utsmani terlebih dahulu. Usaha pertamanya menciptakan tentara modern, Bey Husayn dibantu teknisi dari Eropa. Dari tahun 1835-1837, Bey Mustafa berusaha memelihara ikatan dengan kerajaan Turki Utsmani. Dia mengirim prajurit kepada kerajaan Turki Utsmani dalam pendudukannya di Libya sebagai pengganti upeti.<sup>96</sup>

Setelah itu kerajaan Turki Utsmani memiliki hubungan yang renggang antara keduanya. Selain karena kerajaan Turki Utsmani disibukkan dengan peperangan dengan Rusia dan mempertahankan wilayah-wilayah kekuasaannya di Eropa juga disebabkan bey Tunisia yang sudah bosan memberi atau mengirim upeti kepada kerajaan Turki Utsmani dan mendekatkan hubungan diplomatik dengan Prancis.

---

<sup>94</sup> Streans, *Op. Cit.*, hal. 549.

<sup>95</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 194.

<sup>96</sup> Streans, *Op. Cit.*, hal. 548.

### 2.4.2 Imperialisme Prancis di Tunisia

Dengan berakhirnya perang Napoleon dengan Mesir pada tahun 1798, kekuasaan dan pengaruh Eropa menyebar luas. Dunia Islam dibukakan matanya untuk menyadari kemunduran umat Islam. Pengadopsian teknik baru industri dan metode baru pengorganisasian industri terdorong oleh energi dan kebutuhan di mana perang telah diletuskan. Kemudian, para pedagang bergerak bebas mencari bahan-bahan kebutuhan industri. Sementara agama dan budaya hukum Islam terus tersimpan lama, pemikiran baru muncul mencoba untuk menjelaskan alasan kekuatan Eropa dan menunjukkan bahwa negara-negara Islam dapat mengadopsi ide-ide dan metode Eropa tanpa mengkhianati kepercayaan umat Islam sendiri. Orang-orang tersebut dikembangkan dan dikirim ke sekolah yang dibuat oleh pemerintah atau misionaris reformasi asing. Kemudian mereka (pelajar-pelajar Muslim yang mendapat pendidikan di negara –negara Eropa) dapat mengekspresikan ide-ide mereka melalui media baru dari koran dan majalah. Ide-ide mereka didominasi dengan mereformasi hukum Islam, penciptaan baru dasar kerajaan Turki Utsmani, dan persamaan warga negara.<sup>97</sup>

Sekitar tahun 1830 dan 1840 dimulai revolusi dalam bidang transportasi dengan mendatangnya kapal uap dan rel kereta api. Ini memungkinkan tidak hanya memindahkan barang-barang mewah tetapi barang-barang ukuran besar untuk pasar yang lebih besar dengan jarak yang jauh sehingga terjadi perluasan perdagangan dunia.<sup>98</sup> Tunisia dijadikan pasar penjualan barang-barang tersebut.

Pada tahun 1830, Prancis berhasil menginvasi Algeria, di mana Tunisia pada saat itu merupakan salah satu provinsi kerajaan Turki Utsmani. Pada tahun 1835 keamanan Tunisia secara langsung terancam oleh Prancis.<sup>99</sup> Tetapi ancaman ini tidak disadari oleh Tunisia karena

<sup>97</sup> Hourani, *Op. Cit*, hal. 263.

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 266.

<sup>99</sup> Tunisia History (<http://www.tunisiadaily.com/tunisia-history>) diakses pada tanggal 20 Juni 2009, pukul 14.00 WIB.

adanya keinginan dan kebutuhan Tunisia dalam mereformasi militer dan administrasi pemerintahan.

Ada dua kondisi yang menguntungkan Prancis pada saat itu yaitu pertama dengan ditaklukkannya Algeria, negara tetangga Tunisia, mempermudah mobilitas Prancis dalam memonopoli perdagangan. Kondisi kedua adalah dengan diadakannya perjanjian perdagangan pada tahun 1830<sup>100</sup> sehingga kondisi pertama dan kedua alaha satu kesatuan yang saling melengkapi. Memang dengan perjanjian perdagangan terssebut monopoli negara tentang minyak zaitun berakhir, tetapi hal ini juga mendorong terjadinya monopoli perdagangan oleh negara-neraga Eropa terutama Prancis. Pihak yang memonopoli akan turut campur dalam masalah kekuasaan atau yang berhubungan dengan monopoli itu sendiri sehingga memberi ruang gerak yang bebas bagi Prancis dalam mengeksploitasi potensi-potensi alam dan penduduk Tunisia. Kedua kondisi tersebut menjadikan Prancis tetap eksis di Tunisia. Apalagi Tunisia sedang mengalami masa transisi modernisasi dan westernisasi yang berasal dari Eropa. Dari imperialisme ini kemudian tumbuh kapitalisme dan liberalisme di Tunisia yang tidak disadari oleh bey-bey Tunisia.

Hubungan diplomatik antara Prancis dengan Bey-Bey Tunisia memberikan gerbang awal perizinan monopoli perdagangan yang akan merugikan perekonomian Tunisia. Juga pemberian pinjaman yang mudah oleh Prancis terutama yang dilakukan Mustafa Khaznadar melenakan Tunisia dari ancaman protektorat Prancis di kemudian hari.

Untuk mendapatkan jaminan keamanan dan hak di Tunisia, orang-orang non-Muslim meminta untuk mendapatkan persamaan antara orang-orang asing dengan Muslim sebelum hukum dan hak atas properti mereka.<sup>101</sup> Kemudian mereka mengendalikan kekuasaan di pemerintahan dan masyarakat agar tidak terjadi pemberontakan umat Islam di Tunisia.

---

<sup>100</sup> Streans, *Op. Cit*, hal. 549

<sup>101</sup> *Ibid*, hal. 549.

Pada pertengahan abad ke-18 Prancis mulai menyebarkan ide-ide yang lahir dari Revolusi Prancis pendapat mereka lewat surat kabar-surat kabar. Ketika perang Prancis-Jerman pecah pada tahun 1871, Prancis dan Italia bersaing untuk meluaskan pengaruhnya di Tunisia untuk menarik opini publik.<sup>102</sup>

Reformasi menyeluruh yang dilakukan Khairuddin At-Tunisi sangat dimanfaatkan oleh Prancis untuk mencapai tujuan mereka. Universitas Sadiqi yang didirikan oleh Khairuddin tidak berada dalam pengawasan sarjana Muslim, tetapi berada dalam pengawasan Prancis.<sup>103</sup> Walaupun ketika Khairuddin menjadi PM, ruang gerak Prancis di batasi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Namun, sempat ada rencana Prancis untuk mendirikan beberapa sekolah dasar 'Franco-Arab'.<sup>104</sup>

Pembatasan ruang gerak yang dilakukan Khairuddin membuat Prancis marah, sehingga Prancis membujuk Bey Muhammad Sadiq yang juga tidak suka dengan pembatasan kekuasaan terhadapnya untuk memberhentikan Khairuddin sebagai PM. Tetapi, keputusan pemberhentian Khairuddin sebagai PM justru mengantarkan Tunisia pada protektorat Prancis pada tahun 1881.<sup>105</sup>

#### 2.4.3 Tunisia Pada Masa Kekuasaan Bey-Bey Tunisia

Penguasa lokal Tunisia telah diberi kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-18 menjadikan hubungan penguasa lokal dengan kerajaan Turki Utsmani sedikit renggang. Kemudian kerenggangan hubungan ini mempermudah pihak asing atau Eropa merangkul Tunisia dalam

<sup>102</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 219.

<sup>103</sup> Stearns, *Op. Cit.*, hal. 550.

<sup>104</sup> Hourani, *Op. Cit.*, hal. 302.

<sup>105</sup> Albert Hourani, *Arabic Thought in The Liberal Age, 1798-1939* (New York: Cambridge University Press, 1962), hal. 86.

hubungan diplomatiknya. Tunisia pada tahun 1800 sudah dipegang oleh Dinasti Husayn.<sup>106</sup> Namun, dari sejumlah bey-bey yang telah memerintah, di sini hanya dipaparkan tiga bey saja yaitu Bey Ahmad Pasya, Bey Muhammad Tunis, dan Bey Muhammad Sadiq.

#### 2.4.3.1 Masa Bey Ahmad Pasya (1837-1855)

Bey Ahmad Pasya adalah penguasa yang paling aktif dan inovatif pada abad ke-19. Program-programnya membangun hubungan baik antara ulama dan kepala suku di mana ditawarkan berbagai macam perjanjian dan hadiah. Dia meningkatkan partisipasi orang-orang Tunisia dalam kantor pemerintahan yang tinggi.<sup>107</sup>

Bey Ahmad mempunyai ambisi memodernkan tentara dan memajukan negaranya. Oleh karenanya, dia memperbarui angkatan bersenjata dan angkatan laut. Bey Ahmad memulai reformasinya dengan menambah dan memodernkan tentaranya serta menciptakan sebuah Politeknik Ekole yang diniatkan untuk pegawai-pegawai perkeretaapian modern. Reformasi militer diikuti dengan rencana ambius dengan memperkenalkan industrialisasi. Kebutuhan akan militer yang mandiri membuat Tunisia melibatkan pembangunan militer untuk memenuhi kebutuhan militer. Tempat-tempat mesiu, sebuah penuangan besi meriam, tempat penyamakan kulit, dan pabrik tekstil juga dibangun. Tentara baru tidak hanya memerlukan senjata dan seragam tentara yang baru, tetapi juga perlu memberlakukan doktrin Eropa. Sejak Bey Ahmad Pasya berkuasa orang-orang Eropa, barang-barang komoditi, dan ideologi-ideologi membanjiri Tunisia dalam jumlah dan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya.

Pada tahun 1840, didirikan sebuah sekolah militer bernama sekolah militer Bardo. Sekolah ini diinspirasi oleh sekolah militer

---

<sup>106</sup> Streamns, *Op. Cit*, hal. 548

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 549.

yang didirikan oleh pembaharu Mesir, Muhammad Ali Pasya, untuk memberikan pelatihan bagi kader yang baru di antara empat puluh dan enam puluh teknis matapelajaran (matematika, teknik, fortifikasi, dan lain-lain) serta ajaran Islam dan berorientasi pada mata pelajaran bahasa Arab. Sekolah itu mempergunakan dua bahasa yaitu Arab dan Prancis. Bahasa Prancis merupakan bahasa untuk berkomunikasi dengan para pelatih dari Prancis dan negara Eropa lainnya. Sekolah ini melibatkan pelatih dan administrasi Italia, Inggris, Prancis, dan Syaikh Qabadu sebagai pengajar bahasa Arab dan agama Islam. Sekolah militer Bardo ini didisain untuk mempersiapkan lulusan yang akan dipekerjakan dalam administrasi dan tentara. Sekolah ini terdiri dari enam sampai sembilan tahun untuk dilatih langsung oleh pelatih Eropa.<sup>108</sup> Namun reformasi militer yang dilakukan Bey Ahmad membutuhkan dana yang sangat besar, maka dia memberlakukan pajak baru dalam pertanian dan monopoli-monopoli negara pada rokok, garam, dan kulit.

Pada tahun 1842 Bey Ahmad Pasya memberi keputusan pengangkatan secara resmi fungsi pendidikan yang baik me membuat Az-Zaitunah menjadi pusat pendidikan tinggi di Tunisia.<sup>109</sup> Sejak kerajaan Turki Utsmani merebut kembali Tunisia dari tangan orang-orang Spanyol, mereka berusaha memperbaiki kembali bahkan memperbesar Masjid Az-Zaitunah, perpustakaan, dan juga madrasahnyanya. Usaha yang dilakukan kerajaan Turki Utsmani itu membuat Masjid Az-Zaitunah kembali menjadi pusat kebudayaan Islam.

Pemberlakuan reformasi militer ini membuat masalah baru. Berkembangnya kepentingan luar negeri, memberi kekuatan untuk campur tangan bagi pihak yang meminjami pinjamannya, dan membawa ide-ide baru politik oleh pelatih-pelatih tentara modern.<sup>110</sup> Selain itu, untuk menyediakan tenaga kerja untuk tentara dan angkatan laut Bey

---

<sup>108</sup> Streamns, *Op. Cit.*, hal. 549.

<sup>109</sup> Lulat, *Op. Cit.*, hal. 168

<sup>110</sup> Lihat Albert Hourani, *Arabic Thought in The Liberal Age*, hal. 64.

Ahmad Pasya mengambil langkah wajib militer bagi para petani. Dalam jangka pendek, kewajiban tersebut membutuhkan banyak orang untuk memasukkan ke dalam angkatan bersenjata, tetapi prakteknya mendistribusikan penanaman konsep bahwa orang-orang Tunisia biasa harus mempunyai tempat dalam aparaturnegara karena itu merupakan sebuah tiang di masa depan.

Bey Ahmad Pasya semakin mendekatkan diri dengan Prancis setelah kerajaan Turki Utsmani membangun kembali secara langsung administrasi di Tripoli. Sekitar tahun 1830 dan 1840, terjadi pergantian perjanjian dagang yang tidak sama oleh kekuatan superior Eropa yang menyetir Bey Ahmad untuk memacu berbagai macam reformasi yang menekankan perluasan kesatuan tentara mereka. Bey Ahmad memberikan perizinan bagi pedagang besar dan kecil Eropa di Tunisia.<sup>111</sup>

Rakyat bersaing dengan pedagang-pedagang Eropa dengan tidak seimbang. Para pekerja tangan lama-lama hilang karena persaingan dan dominasi perdagangan Eropa. Selain itu, emas dan perak digunakan untuk membayar impor barang. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab penurunan drastis dan hilangnya sumber daya alam dan energi untuk mengatasi perkembangan imperialisme dan kapitalisme Eropa yang agresif. Lagipula, awal abad ke-19 adalah periode terulangnya epidemik penyakit kolera dan tipus serta kegagalan panen.

Sejak dahulu perbudakan telah ada baik di Turki maupun di Tunisia. Oleh karenanya, Bey Ahmad Pasya menutup pasar budak di Tunisia pada tahun 1841 di bawah desakan Eropa. Pendeklarasikan semua anak menjadi bebas pada tahun 1842 dan akhirnya Bey Ahmad mengumumkan kemerdekaan para budak tahun 1846.<sup>112</sup>

Meluasnya resesi pertanian yang disertai epidemik kolera tahun 1849-1850<sup>113</sup> adalah sebuah konsekuensi pajak yang berlebihan dan

<sup>111</sup> Lihat Albert Hourani dalam kepustakaan.

<sup>112</sup> Streams, *Op. Cit.*, hal. 549

<sup>113</sup> Nancy Elizabeth Gallagher, *Medicine and Power in Tunisia, 1780-1900* (New York: Cambridge University Press, 2002), hal. 97.

kurangnya penanaman modal. Pada tahun itu pula, Bey Ahmad memaksa keras untuk mengkarantina dan mengukur kesehatan publik lain. Ringkasan pukulan Bey Ahmad dalam usaha modernisasi, L. C Brown mengatakan

“Kehidupan sehari-hari dan keinginan rata-rata orang Tunisia telah dimodifikasi dengan 18 tahun pemerintahan...Jumlah orang-orang Tunisia pada tahun 1855 sama seperti tahun 1837 yaitu para petani, pengawas hutan, para pendeta, pengrajin, dan pedagang. Kehadiran sekolah tidak meningkat. Kecepatan mobilitas tampak tidak berubah”.<sup>114</sup>

Rencana reformasi di bidang militer dan administrasi yang dilakukan Bey Ahmad Pasya merupakan suatu perbaikan yang layak dihargai dan disambut baik karena tuntutan zaman yang memasuki abad modern dan kemajuan pengetahuan. Seharusnya reformasi yang dilakukan di bidang militer menjadikan sistem keamanan Tunisia menjadi sangat baik dan terlindungi dari ancaman intervensi Eropa. Namun, kelemahan dari reformasi yang dilakukan militer ini mengambil pelatih militer dari Eropa di mana Eropa khususnya Prancis dapat mengetahui titik kelemahan pada keamanan militer Tunisia dan gerbang awal pembawa ide-ide baru politik. Padahal ada dari kalangan umat Islam yang dapat melatih militer yaitu Muhammad Ali dari Mesir. Hal ini sangat dimanfaatkan oleh pihak-pihak Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Italia.

Di samping itu, reformasi yang akan dilakukan Bey Ahmad pasti membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit sehingga Bey Ahmad perlu memikirkan pendapatan Tunisia yang akan digunakan sebagian untuk keperluan militer. Menaikkan pajak bukanlah solusi terbaik dalam menambah pendapatan negara. Negara dan rakyat memang perlu perlindungan dari ancaman negara lain sehingga dibutuhkan reformasi militer guna memperkuat pertahanan negara, tetapi bukan berarti tenaga dan harta rakyat diperas begitu saja demi melakukan reformasi tersebut.

---

<sup>114</sup> Allman, *Op. Cit.*, hal. 29.

### 2.4.3.2 Masa Bey Muhammad Tunis (1857-1859)

Bey Muhammad Tunis adalah penguasa Tunisia yang paling singkat memerintah Tunisia. Bey Muhammad Tunis memerintah dari tahun 1857-1859. Setelah pemerintahan Bey Ahmad, tidak ada perubahan yang mendasar dalam administrasi dan lembaga pemerintahan. Dengan penurunan pendapatan dari pendapatan bukan pajak, rakyat di kota dan desa diperas lebih keras lagi dalam hal pajak.

Namun, pada masa kekuasaan Bey Muhammad terjadi peristiwa penting dalam sejarah Tunisia. Kebijakan yang dilakukan Bey Muhammad Tunis dengan perjanjian keamanan yaitu '*Ahd al-Aman*'. Perjanjian ini tidak lain berasal dari permintaan orang-orang Eropa untuk mendapatkan persamaan antara orang-orang asing dengan Muslim sebelum hukum dan hak atas properti mereka dan juga penghapusan monopoli bagi pihak Tunisia.

Bey Muhammad Tunis mengadopsi politik yang mengakibatkan penghancuran ekonomi Tunisia.<sup>115</sup> Awalnya untuk membuka diri kepada campur tangan asing tetapi terjebak dalam kepentingan negara-negara Eropa. Menurut Larry A. Barrie, Bey Muhammad Tunis mempunyai dua kesalahan. Pertama, menentang konsul atas pertanyaan perbudakan<sup>116</sup> karena Bey Muhammad Tunis memberlakukan kembali perdagangan budak yang telah ditutup oleh Bey Ahmad Pasya. Bey Muhammad Tunis beranggapan bahwa institusi perbudakan seperti tidak dapat dipisahkan dari tradisi masyarakat Tunisia. Sikap ini membuat Eropa melakukan intervensi terhadap Tunisia. Kedua, kesalahan yang dilakukan Bey Muhammad Tunis dalam keadilan administrasi.

Pada tahun 1857 Bey Muhammad Tunis mendirikan tempat pengumpulan subsidi tunggal yang dinamakan *Majba* yaitu tempat penarikan pajak di mana pajak merupakan pendapatan terbesar Tunisia.

---

<sup>115</sup> Streams, *Op. Cit*, hal 549.

<sup>116</sup> Larry A. Barrie, Ahmad Bey Husayn, (<http://www.answers.com/topic/ahmad-bey-husayn>).

Pada tahun 1859 dibangun sebuah konstruksi sistem telegraf oleh perusahaan Prancis.<sup>117</sup>

Melihat kebijakan yang diambil oleh Bey Ahmad Pasya seharusnya menjadi pembelajaran bagi Bey Tunisia berikutnya. Memang tidak sepenuhnya mengalami kegagalan atas reformasi yang dilakukan. Namun, Bey Muhammad Tunis dapat mengeluarkan kebijakan dengan penuh kehati-hatian dengan dampak atau hasil dari reformasi yang dilakukan oleh Bey Ahmad Pasya.

Keterkaitan pihak asing dalam masalah-masalah negara tidak dapat menentukan majunya negara atau berkembangnya negara. Melainkan potensi dan kemauan yang melibatkan semua elemen masyarakatlah membuat kemajuan negara itu sendiri. Ketidakmauan Bey Muhammad Tunis untuk mendekati diri pada penguasa lokal dan ulama menjadi kelemahan yang mendasar. Padahal Tunisia terdiri dari suku-suku yang mengetahui kadar potensi dan kekuatan negeri sendiri seperti yang dilakukan oleh Bey Ahmad Pasya. Pemerasan yang dilakukan Bey Muhammad Tunis dengan memberlakukan pajak lebih keras lagi akan membuat para petani enggan untuk bertani sehingga semakin memperburuk perekonomian Tunisia. Jika para petani enggan bertani maka pemasukan Tunisia sama sekali tidak ada.

#### **2.4.3.3 Masa Bey Muhammad Sadiq (1859-1882)**

Bey Muhammad Sadiq memerintah pada tahun 1859. Pada masa kekuasaan inilah campur tangan Eropa terutama Prancis semakin kuat dan besar. Tidak ada dana keuangan di Tunisia sampai tahun 1860. Tahun 1860 adalah puncak krisis keuangan yang dialami Tunisia. Hal ini dikarenakan korupsi yang dilakukan Mustafa Khaznadar dan hutang yang membelit Tunisia karena Mustafa Khaznadar yang sering meminta

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

pinjaman kepada negara-negara Eropa.<sup>118</sup> Mustafa Khaznadar adalah Perdana Menteri Tunisia dari masa pemerintahan Bey Ahmad sampai masa pemerintahan Bey Muhammad Sidiq. Mustafa Khaznadar tidak menjalankan tugas yang harusnya dilakukan dia sebagai Perdana Menteri. Dia hanya mengumpulkan harta dengan korupsi yang dia lakukan.<sup>119</sup> Dia telah merugikan rakyat dan Tunisia.

Pada tahun 1861 pengumuman konstitusi, yang pertama di dunia Islam. Merespon penawaran Eropa untuk membatasi pemerintahan dengan sebuah dewan perwakilan atau majelis yang berisi enam puluh anggota yang ditunjuk dari sejumlah elit Tunisia. Majelis ini didisain sebagai pemeriksa dalam administrasi Bey dan memiliki kewenangan untuk membuat hukum-hukum, mengatur pajak, APBN, dan militer. Pada tahun 1863 pemerintah menandatangani kontrak kerja sama dengan *the Franch Banking House of Erlanger* mengenai peminjaman internasional pertama.<sup>120</sup>

Pada awal tahun 1862 hutang nasional meningkat sekitar 28 juta *francs* dan Mustafa Khaznadar malah menambah pinjaman kepada Prancis. Kemudian dia menaruh modal 35 juta *francs* di bursa Prancis tahun 1863. Pada tahun 1863 didirikan Majelis Syura atau Majelis Permusyawaratan yang diketuai oleh Khairuddin. Khairuddin mencoba untuk benar-benar menjalankan Majelis Syura sebagaimana fungsinya seperti konstitusi yang diumumkan pertama kali<sup>121</sup>.

Kegagalan percobaan pemerintahan konstitusional yang tidak berlangsung lama disebabkan oleh krisis keuangan, kerusuhan antar suku, tekanan dan persaingan antara Prancis dan Inggris, dan keinginan Bey Ahmad Pasya yang tetap bebas berkuasa. Prancis dengan mudahnya melobi Bey Muhammad Sadiq untuk menyetujui proyek perpanjangan saluran air Zagwan ke Qartanjah sebelum dibahas di Majelis Syura.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Ali, *Op. Cit.* hal. 196.

<sup>120</sup> Stream, *Op. Cit.* hal. 549.

<sup>121</sup> *Ibid.*

Ketakutan, kemarahan, dan kemakuan meledak dalam skala besar atau penuh pemberontakan tahun 1864.<sup>122</sup> Pada tahun 1864 juga terjadi penghentian konstitusi. Pemberontakan terhadap penggandaan Majba. Banyak kolektor pajak membunuh kegelisahan yang meluas dari para petani dan suku-suku di pusat Tunisia, Sfax, dan Qayrawan dengan cara kekerasan. Ulama dan militer yang sebelumnya tidak terkena pajak juga pun ikut bergabung pemberontakan. Bangkit dari penindasan ketika Bey menjanjikan pengurangan pajak, melobi penguasa lokal untuk menjadi kolektor pajak, dan membatalkan penghentian konstitusi .

Khairuddin melukiskan gambaran suran situasi pemberontakan yang terjadi dan meminjaman sejumlah uang yang dilakukan oleh Khaznadar ini:

“Orang Arab, tidak lagi mendukung rezim kediktatoran dan ketidakadilan yang dikenakan kepada mereka, satu orang diakhir pemerintahan bangkit, untuk mengatasi huru-hara yang membawa pemerintahan ke jurang kemusnahan. Bey berada dalam kesulitan dan tidak mampu membendung pemberontakan, menunggu dari hari ke hari kekacauan menyerbu kota dan tempat tinggalnya”<sup>123</sup>

Scott lebih melihat pemicu gerakan petani dari konteks struktural. Ia menunjuk faktor struktur agraris yang rapuh dan eksplosif sebagai penyebab utama terjadinya keresahan dan perlawanan kaum tani pedesaan. Derajat eskploitasi juga memegang peranan penting dalam mempercepat munculnya gerakan petani. Jika eksploitasi mencapai tingkat tertentu atau melebihi batas subsistensi masyarakat pedesaan maka kondisi tersebut sangat memungkinkan meletusnya protes-protes sosial atau pemberontakan petani sebagaimana yang terjadi di Sfax, Qayrawan, dan pusat Tunis.<sup>124</sup>

Menurut Scott perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak atau berupa kejutan-kejutan di bidang ekonomi yang mengacaukan dan

<sup>122</sup> Kenneth J. Perkins, *A History of Modern Tunisia*, New York: Cambridge University Press, 2004, hal. 29.

<sup>123</sup> Perkins, *Op. Cit*, hal. 29.

<sup>124</sup> Centre for Social Analysis (Akatiga Foundation) , Jurnal Analisis Sosial (<http://books.google.co.id>).

merusak pola subsistensi yang telah berlangsung tetap di masyarakat pedesaan seperti kenaikan harga, pajak, bencana alam, dan kegagalan panen, juga dapat menjadi faktor yang menimbulkan kemarahan dan frustrasi kaum tani kemudian dapat memicu mereka melancarkan gerakan-gerakan radikal di pedesaan.<sup>125</sup>

Kejadian-kejadian tersebut mempengaruhi pemikiran politik Khairuddin, yang pada saat itu sudah keluar dari Majelis *Shura*, sebagai ekspresi tulisan politiknya. Buku yang telah disebutkan sebelumnya. Pada tahun 1869 dibentuk Komisi Keuangan Internasional yang digagas dari Prancis untuk mengontrol anggaran belanja, mengontrol semua pemasukan, dan mengatur pembayaran cicilan pinjaman. Komisi ini dipimpin oleh Khairuddin dan terdapat campur tangan Prancis dan Inggris.

Selama menjalankan komisi ini, ekonomi Tunisia mengalami kemajuan. Khairuddin berpendapat bahwa tingginya pajak telah menghilangkan hasil pertanian dan menyebabkan negara hancur. Petani tidak mau menanam apabila hasil panennya tidak untuk mereka.<sup>126</sup> sehingga Khairuddin berusaha untuk mengurangi pajak yang diberlakukan sebelumnya. Rakyat sangat antusias menyambut kebijakan ini. Banyak rakyat yang tadinya pergi dari Tunisia karena tingginya pajak yang diberlakukan pada rakyat, akhirnya kembali lagi mengetahui hal ini.

Dari masa Bey Ahmad Pasya sampai masa Bey Muhammad Sadiq, mereka hanya menekankan sebagian besar pendapatan negara dengan memberlakukan pajak yang tinggi. Komisi ini juga memberhentikan Mustafa Khaznadar sebagai Perdana Menteri karena terbukti melakukan korupsi.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Ali, *Op. Cit.* hal. 215.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 216.

#### 2.4.3.4 Masa Khairuddin At-Tunisi (1873-1877)

Sejak pemberhentian Mustafa Khaznadar sebagai Perdana Menteri, Khairuddin diangkat menggantikan Mustafa Khaznadar sebagai Perdana Menteri pada tahun 1873. Korupsi yang dilakukan oleh Khaznadar selama 36 tahun membuat rakyat dan negara menderita. Khairuddin melakukan reformasi yang menyeluruh; politik, ekonomi, dan pendidikan. Reformasi merupakan prasyarat bagi terbentuknya masyarakat madani.<sup>128</sup> Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis secara politik, sejahtera secara ekonomi, *capable* secara intelektual, menghargai supremasi hukum, menjunjung tinggi harmoni dan kemajemukan sosial dan budaya, serta *committed* terhadap semangat kebangsaan.<sup>129</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi merujuk pada kata benda yang dapat didefinisikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama).<sup>130</sup> Khairuddin telah menuangkan pikirannya mengenai reformasi dalam karyanya dan kini pengaplikasian tersebut.

Pada tahun 1875, Khairuddin mendirikan Universitas Sadiqi. Fasilitas universitas pertama yang tidak dikontrol oleh sarjana agama. Profesor-profesor harus menanamkan kecintaan agama kepada pelajar (mahasiswa) dengan menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu indah dan sempurna, memberitahu perbuatan Rasulullah, mukjizat yang dimiliki dan kebaikan yang dilakukan Rasulullah. Tujuan sekolah ini berhubungan dengan pendirian deklarasi:

“Untuk mencapai penulisan, manfaat pengetahuan, dan Al-Quran, bahwa ilmu hukum, bahasa asing, dan ilmu rasional mungkin berguna untuk Muslim yang pada saat bersamaan tidak bertentangan dengan iman. Para professor harus menanamkan pada mahasiswa mencintai iman mereka dengan menampilkan keindahan dan keunggulan Rasulullah, keajaiban yang dilakukan oleh Beliau, dan kebaikan-kebaikan orang alim”.<sup>131</sup>

<sup>128</sup> B. J. Habibie, *Pandangan dan langkah Reformasi*, Jakarta: Sekeretariat Wakil President RI, 1999, hal. 21.

<sup>129</sup> *Ibid*, hal. 296.

<sup>130</sup> *Reformasi Kerdil* dalam *Economica Papers*, edisi 35, Mei-Juni 2008, hal. 4.

<sup>131</sup> Azzam S. Tamimi, *Rachid Ghonnouchi: A Democrat Within Islamism* (London: Oxford University Press, 2001), hal. 64.

Khairuddin menekankan pada pentingnya pendidikan modern dan ilmu pengetahuan bagi umat Islam sehingga dia mengumpulkan dan mengatur buku-buku yang berserakan dan didirikannya perpustakaan besar serta perbaikan pada Az-Zaitunah. Membenahi percetakan negara dan menyiarkan buku-buku. Selain itu, Khairuddin memperbaiki surat kabar resmi yaitu Al-Ra'id At-Tunisi. Rakyat dianjurkan mengisinya dengan makalah-makalah dan aspirasi-aspirasi rakyat yang berhubungan dengan politik. Pegawai pemerintahan wajib membaca surat kabar ini. Perekonomian mulai tertata baik sehingga Tunisia mempunyai pendapatan negara yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika Khairuddin menjadi PM Tunisia pada tahun 1870an, dia mengkritisi penghapusan hukum konstitusional. Dia menjawab kritiknya itu dalam memorandum yang mengandung motif-motif:

“Jika undang-undang konstitusional mempunyai makna, untuk hal-hal yang diperlukan seorang pemimpin yang bersedia untuk mengajarkan mereka, rakyat yang memahami dan bersedia menerima mereka. Bukan kondisi yang ada di Tunisia dan karena itu ‘sebuah kata tanpa makna’.<sup>132</sup>

Reformasi ekonomi mencakup usaha mulai dari mengatasi krisis ekonomi, memberdayakan ekonomi rakyat, memperkuat kelembagaan perekonomian, mendorong persaingan sehat, sampai kepada pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam kegiatan ekonomi-bisnis.<sup>133</sup> Penderitaan yang berkepanjangan yang dialami oleh rakyat khususnya para petani, Khairuddin mengambil kebijakan yang belum pernah dilakukan para Bey Tunisia maupun PM sebelumnya. Kebijakan ekonomi tersebut adalah meringankan beban pajak yang selama ini melilit rakyat bahkan menghapus pajak yang tidak perlu atau tidak masuk akal menurutnya. Hal ini sangat penting dilakukan karena sebagian penduduk Tunisia bergerak di bidang agraris sehingga sebagian besar pemasukan negara berasal dari bidang ini. Angka penggarap lahan pertanian meningkat dan terbentuk upah minimum. Kebijakan ini juga membuat

<sup>132</sup> Hourani, *Arabic Thought in The Liberal Age, 1798-1939* (New York: Cambridge University Press, 1962), hal. 64.

<sup>133</sup> Habibie, *Op. Cit.*, hal. 8.

orang-orang Tunisia yang sempat pergi dari Tunisia kini kembali ke Tunisia karena mendengar peringanan pajak.

Dengan diringkannya pajak bahkan penghapusan pajak yang pertanian yang tidak perlu, rakyat dapat membangkitkan kepercayaannya kepada pemerintah dalam hal mensejahterakan rakyat juga untuk meningkatkan daya saing dengan pihak asing yang tidak seimbang sebelumnya. Semua pihak (rakyat) tidak akan dirugikan dengan kebijakan tersebut. Hubungan antara pemilik tanah, penggarap, pemerintah juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang diuntungkan dan pihak-pihak yang dirugikan. Kekerasan yang sering dialami para petani sebelumnya benar-benar diminimalisir dengan membubarkan kesatuan-kesatuan tentara atau kolektor pajak untuk menarik pajak dengan kekerasan. Para petani juga dibina untuk mengelola lahan pertaniannya sehingga para petani bisa memaksimalkan produksi pertaniannya. Rakyat benar-benar diajak untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi yang lebih mapan. Pemuda juga dirangkul dengan memberikan pelatihan membuat kerajinan Maghribi.

Reformasi identik dengan peningkatan kualitas demokrasi. Suatu negara demokrasi yang stabil hanya dapat terwujud jika seluruh perangkat masyarakatnya bekerja bahu-membahu untuk menegakkan hukum berdasarkan konstitusi.<sup>134</sup> Khairuddin mengutus beberapa ahli hukum untuk mempelajari undang-undang di kerajaan Turki Utsmani, Mesir, dan Eropa guna mengambil bagian-bagian perundangan negara-negara tersebut yang layak diterapkan di Tunisia. Hal ini dikarenakan hukum yang berlaku di Tunisia pada saat itu memakai hukum dua mazhab sekaligus, yaitu Mahzab Maliki dan Hanafi. Khairuddin juga mendengar tuntutan diplomat asing yang rasional dan menolak tuntutan yang tidak rasional dengan alasan-alasan yang bijak dan rasional pula.

Dominasi yang dilakukan oleh Prancis di Tunisia membuat Khairuddin ingin mencoba mengurangi dan membatasi dominasi tersebut.

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hal.21.

Oleh karena itu, dia mempererat hubungan dengan kerajaan Turki Utsmani lewat kunjungan kerjanya. Khairuddin membatasi izin yang sebelumnya telah diberikan oleh Bey-Bey sebelumnya dan membatasi izin yang dibuat Eropa untuk menjaga perlawanan semacam kolusi antara ahli keuangan Eropa dengan orang-orang pemerintahan pada masa PM Mustafa Khaznadar. Ketika persaingan Eropa terhadap kontrak dan izin tumbuh kuat pada akhir tahun 1870an, Khairuddin mengambil keputusan yang radikal yaitu menolak izin untuk rel kereta api, pelabuhan, barang tambang, dan utilitas yang sebagian besar didisain untuk memperluas perizinan dan fasilitas imperial Prancis di wilayah ini.<sup>135</sup> Mereka memonopoli itu semua. Sekalipun demikian, penolakan Khairuddin kepada Eropa membawa dampak perlawanan kepentingan koalisi yang berakhir pada pemberhentian Khairuddin sebagai Perdana Menteri. Hal ini mengantarkan Tunisia di bawah protektorat Prancis pada tahun 1881.

#### **2.4.3.5 Protektorat Prancis**

Khairuddin mengundurkan diri pada tahun 1877 karena alasan yang telah dijelaskan di atas. Bey Mustafa merupakan Bey favorit dan teman baru Prancis. Di bawah kekuasaannya, tirani, pemerasaan, dan korupsi kembali hadir di Tunisia. Pada akhir 1878, terjadi kerusakan ekonomi negara yang tidak terselesaikan dan ketidakmampuan pemerintah memenuhi kewajibannya kepada komisi keuangan. Usia tua yang telah dialami Tunisia menjadi alasan melakukan intervensi sekali lagi yang siap membangun. Kemudian di luar sana, Kongres Berlin merencanakan intervensi Prancis terhadap Tunisia. Kongres Berlin dilaksanakan pada tahun 1878. Prancis menyatakan keinginannya menduduki Tunisia. Bismark dari Jerman, sadar akan peran positif yang dimainkan Prancis. Italia yang juga sangat menginginkan Tunisia

---

<sup>135</sup> Kevin Shillington, "*Tunisia: Ahmad Bey and Army Reform*," *Encyclopedia of African History*, hal. 1596-1597.

diperintahkan untuk meninggalkan Tunisia sendiri untuk Prancis. Italia sangat tidak senang dengan ketentuan ini. Italia bersaing dengan Prancis dalam memperkenalkan faktor atau unsure baru sebagai katalisator. Keuntungan Italia sangat dikhawatirkan akibat persaingan ini. Bey Muhammad Sadiq menandatangani Perjanjian Bardo pada 12 Mei 1881 di mana dia tetap mendapat gelar Bey. Penandatanganan perjanjian Bardo diawali dengan pendudukan Prancis wilayah al-Kef, sebelah timur laut Tunisia. Dalam Perjanjian Bardo, Prancis memberikan hak atau kewenangan untuk mengamankan negara dari perbatasan dengan ketentaraan.<sup>136</sup>

Dalam Perjanjian Bardo, Bey tetap menjadi kepala negara tetapi dalam urusan politik luar negeri dan keuangan Tunisia tetap dibawah kontrol Prancis. Kemudian diangkatlah seorang menteri untuk mengurus negosiasi dan kebijakan administratif . Pada bulan Oktober 1882, Bey Muhammad Sadiq meninggal dan digantikan dengan Bey Ali. pada 8 Juni 1883 Bey Ali menandatangani Konvensi al-Marsa pada 8 Juni 1883.<sup>137</sup> Konvensi inilah yang akhirnya membentuk sebuah protektorat di Tunisia.

Tempat sekretaris jenderal dari pemerintahan Tunisia diisi oleh orang-orang Prancis untuk mengendalikan kerja dari berbagai departemen.pemerintahan. Pada tahun 1884, Prancis mengawasi semua urusan pemerintahan. Mereka menempatkan gubernur provinsi dalam sebuah wilayah dan bekerja sama dengan ulama. Prancis menempatkan organisasi provinsi dalam sebuah administrasi yang hierarkis, yaitu ‘*qaid*’ (gubernur provinsi), ‘*khalifa*’ (wakil gubernur), dan ‘*shaikh*’ (administrasi klan suku). Petugas yang mengawasi pengumpulan pajak oleh *qaid*s dan memberi masukan administrasi dalam pekerjaan umum serta memonitoring aktivitas pemimpin-pemimpin politik lokal.

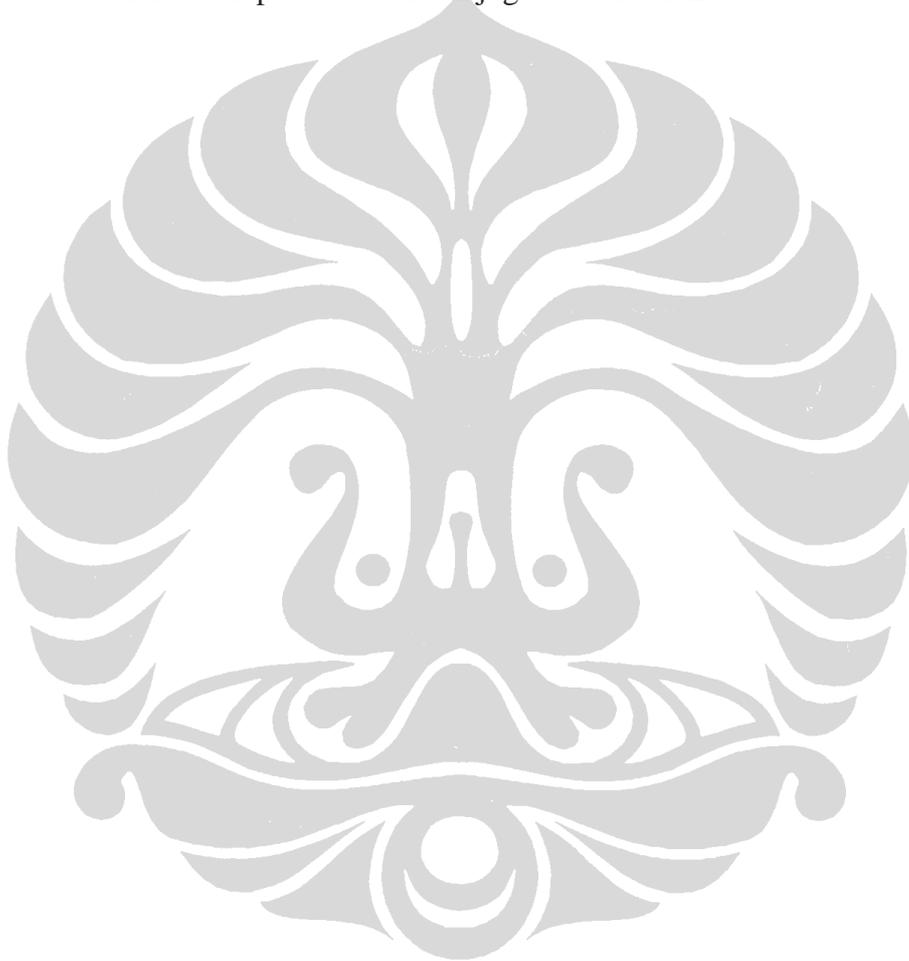
Pada tahun 1888 mendirikan *al-Hadira*, surat kabar mingguan yang mengikuti jejak reformis, Khairuddin At-Tunisi. Ini merupakan surat

---

<sup>136</sup> Streamns, *Op. Cit*, hal. 550.

<sup>137</sup> *Ibid.*

kabar dengan mempublikasikan lembarannya dengan bahasa Arab karya orang Tunisia dalam mempromosikan sebuah agenda untuk perubahan sosial yang didalamnya terdapat penggabungan komponen Islam dan Barat. Untuk menyeimbangi opini publik yang diterbitkan oleh surat kabar *al-Hadira*, Prancis mendirikan *La Dephece Tunisienne*. *La Dephece Tunisienne* merupakan surat kabar harian kebijakan Protektorat Prancis. Kemudian pada tahun 1892 juga diterbitkan *La Tunisie Francaise*.<sup>138</sup>



---

<sup>138</sup> *Ibid.*

### BAB 3

#### PEMIKIRAN REFORMIS KHAIRUDDIN AT-TUNISI

Gerakan kebangkitan atau *Nahda* di dunia Arab yang dimulai pada abad ke-18 secara umum diterjemahkan dengan kata “*renaissance*”, tetapi sesungguhnya mengandung arti bangun atau lebih tepatnya ‘bangun dari tidur’. Di lain pihak, gerakan *Islah* diterjemahkan secara umum sebagai reformisme, yang islami dan kebanyakan berkembang di negara-negara Arab ini juga dialami di India, Rusia, dan Afrika.<sup>139</sup> Reformasi adalah perbaikan secara drastis. Muara dari pemikiran dan gerakan reformasi adalah terwujudnya masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis secara politik, sejahtera secara ekonomi, *capable* secara intelektual, menghargai supremasi hukum, menjunjung tinggi harmoni dan kemajemukan sosial budaya, serta committed terhadap semangat kebangsaan

Reformasi yang dilakukan Khairuddin At-Tunisi pada tahun 1873 ketika dia menjabat sebagai Perdana Menteri. Namun, Khairuddin telah merumuskan sebuah rencana umum untuk perbaikan ke dalam bukunya yang berjudul *Aqwam al-Masalik fi Ma’rifati Ahwal al-Mamalik*. Dalam melakukan reformasi, Khairuddin menitikberatkan pada bidang politik, peradaban, dan ekonomi. Antony Black mengatakan bahwa:

“Khairuddin mengatakan bahwa kajiannya terhadap negara-negara Eropa bertujuan untuk mengambil dari mereka “apa yang cocok untuk syariat kita”. Syariat, menurutnya, “dapat diaplikasikan pada persoalan agama maupun urusan dunia”. Siapa pun boleh meminjam segala sesuatu dari non-muslim asalkan bisa meningkatkan kemakmuran dan kemaslahatan umat Islam dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Dengan kata lain, Eropa dapat mengajari kita metode yang dengannya kita bisa mencapai tujuan Syariat.”<sup>140</sup>

Pendidikan yang dienyam Khairuddin selama empat tahun di Prancis dan membaca literatur Eropa di mana di Eropa juga pernah merasakan kesewenangan kerajaan terhadap rakyat kecil serta peristiwa-

<sup>139</sup> Boulares, *Op. Cit.*, hal. 96.

<sup>140</sup> Black, *Op. Cit.*, hal. 536.

peristiwa sejarah yang terjadi selama hidupnya mempengaruhi pemikiran politiknya.

### 3.1 Pemikiran di Bidang Politik

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Ada lima pandangan mengenai politik yaitu klasik, kelembagaan, kekuasaan, fungsionalisme, dan konflik.<sup>141</sup>

#### 1. Klasik

Politik dalam pandangan klasik dikemukakan oleh Aristoteles adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Kebaikan di sini berupa nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kesejahteraan, dan keinginan orang banyak atau keinginan golongan mayoritas.

#### 2. Kelembagaan

Pandangan kelembagaan menurut Weber berarti berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Negara adalah komunitas manusia yang sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu.

#### 3. Kekuasaan

Pandangan ini dikemukakan oleh Robson. Menurutnya, politik adalah usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhinya.

#### 4. Fungsionalisme

---

<sup>141</sup> Uwes. Fatoni, "Materi Kuliah" dalam Pengantar Ilmu Politik (<http://www.pengantarilmupolitik.blogspot.com>)

Politik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum.

#### 5. Konflik

Dalam memndapatkan kekuasaan selalu terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan, maka lahirlah konflik. Pandangan ini terlalu menekankan aspek konflik padahal dalam politik juga ada konsensus, kerjasama, maupun intergrasi.

Jadi, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yagn tinggal dalam suatu wilayah tertentu.<sup>142</sup>

Perbedaan-perbedaan dalam definisi tersebut disebabkan setiap sarjana hanya dari satu aspek atau unsur dari politik saja. Unsur tersebut dijadikan pokok-pokok meliputi negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).<sup>143</sup>

Tujuan dari pemikiran dan gerakan reformasi ini adalah terwujudnya masyarakat madani. Dalam bidang politik, masyarakat madani merupakan masyarakat yang menghargai hak-hak sipil baik individu maupun kelompoknya. Di dalam kehidupan bernegara, masyarakat yang demikian menuntut adanya transparansi dan proses politik yang demokratis, serta berlakunya check and balances antar berbagai cabang kekuasaan negara, serta terbuka pula terhadap koreksi dan partisipasi masyarakat luas.<sup>144</sup> Dalam refomasi, proses demokratisasi sangat ditekankan karena hal itu yang menjadi tujuan inti dari refomasi.

Demokrasi yang disimpulkan oleh Khairuddin merupakan akibat dari sistem politik yang berkembang pada saat itu di Tunisia adalah sistem

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Miriam. Budiardjo, *Dasar-Dasar Politik*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 9.

<sup>144</sup> Habibie, Op. Cit., hal. 297.

kediktatoran. Demokrasi adalah lawan dari kediktatoran.<sup>145</sup> Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *kratia* yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat ( Robert Dahl, 1989: 3).

Secara umum, kekuasaan penguasa dapat dibatasi dengan dua cara yaitu dengan hukum dan konsultasi. Maksud konsultasi tersebut adalah majelis *shura* atau dewan perwakilan rakyat. Dengan pembatasan kekuasaan penguasa, maka penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya dan korupsi juga tidak akan pernah dilakukan oleh pegawai atau pejabat negara sekalipun. Menurut Lord Acton pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Argumentasinya yang terkenal berbunyi, *"Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely"*.<sup>146</sup>

Ada dua kelompok di mana penguasa harus berkonsultasi yaitu ulama dan orang-orang yang mempunyai hubungan (politisi). Mereka harus dapat berbicara bebas kepada penguasa, membimbing atau mengarahkan penguasa ke jalan yang benar, dan mencegah penguasa dari perbuatan jahat atau melakukan kejahatan. Dengan begitu ada batasan hukum yang stabil.

Namun menurut Khairuddin, dua kelompok tersebut dapat juga menghalangi kemajuan umat Islam ketika mereka tidak bergabung dalam pemerintahan. Kelompok pertama, lanjutnya, adalah kelompok ulama di mana mereka mengetahui syariat tetapi tidak mengetahui urusan dunia. Mereka menginginkan penerapan hukum-hukum agama secara membabi buta, tidak mau memandang apa yang baik dan apa yang sedang terjadi. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok politikus yang mengetahui urusan dunia, tetapi tidak mengetahui agama. Mereka ingin menerapkan tatanan negara-negara Eropa secara menggebu-gebu tanpa merujuk kepada agama.

---

<sup>145</sup> Budiardjo, *Op. Cit.*, hal. 16.

<sup>146</sup> Budiardjo, *Op. Cit.*, hal 52.

Ulama adalah pelayan Islam, penjaga tradisi, pemegang ilmu leluhur, dan penganjur moral bagi masyarakat luas. Selain memberikan legitimasi terhadap para penguasa, para ahli hukum juga (ulama) juga menggunakan pengaruh mereka untuk menjegal kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan sering kali memimpin atau memberikan legitimasi terhadap pemberontakan melawan kelas penguasa.<sup>147</sup> Syariat adalah jalan Tuhan; ia direpresentasikan dengan seperangkat prinsip-prinsip normatif, metodologi untuk menghasilkan aturan hukum, dan seperangkat hukum positif.<sup>148</sup> Dalam sebuah hadits dinisbatkan kepada Nabi, yang berbunyi: “Setiap *mujtahid* (ahli hukum yang berusaha keras menemukan jawaban yang benar) dipandang benar” atau “Setiap *mujtahid* akan mendapat pahala” Dalam kaitannya dengan politik, *knowledge* yang dimiliki ulama merupakan kekuatan yang secara potensial dapat digunakan untuk menggalang umat secara keseluruhan guna mewujudkan suatu tindakan atau proses politik tertentu, dan tidak jarang bahkan tanpa *reserve*.

Kepentingan umum hanya dapat dilayani jika ulama dan *umara* (politisi) bekerja sama; selain itu, mereka bisa benar-benar melaksanakan syariat, hanya jika mereka mempunyai pengalaman politik.<sup>149</sup> Oleh karena itu, harus ada penggabungan dua kelompok itu dan satu sama lain saling membantu. Memang ada ajaran-ajaran agama yang wajib diperhatikan, dan ada hal-hal yang diterangkan oleh agama mengenai kemaslahatan umat yang wajib diukur dengan ukuran manfaat dan *mudharat*, dan semua itu harus dilakukan dengan akal. Namun, ruang gerak ulama sangat dibatasi mengingat Prancis mempunyai andil dan kepentingan dalam pemerintahan Tunisia sehingga partisipasi ulama dalam pemerintahan sangat kecil. Apalagi melihat orientasi para Bey yang condong pada Eropa dan menjadikannya konsuler dalam berbagai permasalahan Tunisia.

<sup>147</sup> Khaled Abou El-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, terj. Gifta Ayu Rahmani dan Ruslani, Jakarta: Ufuk Press, 2004, hal. 26.

<sup>148</sup> El-Fadl, *Op. Cit.*, hal. 42.

<sup>149</sup> *Ibid.*

Umat Islam tidak akan menjadi baik kecuali mereka memiliki majelis perwakilan atau syura yang dapat mengikat kekuasaan penguasa. Maka raja harus dikelilingi oleh para wakil rakyat yang ikut ambil bagian dalam masalah politik dan para menteri yang bertanggung jawab di depan wakil rakyat.

Kekuasaan yang tercipta di Tunisia adalah kekuasaan yang mutlak dipegang oleh bey. Kekuasaan itu dipergunakan dengan leluasa dan sewenang-wenang walaupun pernah terbentuk sebuah majelis syura. Juga pengaruh Prancis yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh ulama atau politisi lokal membuat kekuasaan ini berat sebelah dan membutuhkan keseimbangan. Oleh karena itu, keseimbangan itu dapat diperoleh dengan majelis syura di mana dalam proses pengambilan keputusan mereka yang ada di dalamnya menguraikan kebaikan dari keburukan sesuatu atau kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut.

Kaum tradisionil tidak mempunyai pengaruh yang lebih besar dari Prancis disebabkan oleh tidak adanya seseorang atau sekelompok dari mereka yang dapat dijadikan juru bicara atau figur yang dapat diandalkan. Hal ini juga dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan mereka yang rendah. Sekolah-sekolah yang ada hanyalah madrasah di mana mereka tidak mendapatkan ilmu pengetahuan umum. Ini menjadi penting mengingat bahwa Tunisia sedang berada dalam masa transisi ke dunia *modern*.

Perlawanan terhadap penguasa sepertinya hanya akan menimbulkan kekacauan dan anarki yang pada gilirannya akan mengganggu kelancaran dan ketenangan kaum Muslim dalam menjalankan ibadahnya. Prinsipnya, bagi kaum Muslim lebih baik berada di bawah kekuasaan penguasa yang zalim selagi ia masih membiarkan umat Muslim beribadah; ketimbang melakukan perlawanan dan anarki.<sup>150</sup> Perlawanan kepada penguasa hanya karena reaksi pemerasan terhadap rakyat dengan tingginya pajak oleh Bey tidak berlangsung lama dan dapat

---

<sup>150</sup> Azra, *Op.Cit*, hal. 41.

ditekan oleh kontrol Prancis. Oleh karena itu perubahan sistem politik dari kediktatoran menuju demokrasi sangat sulit dilakukan tanpa adanya kerja sama dari semua pihak termasuk Bey.

### 3.2 Pemikiran di Bidang Hukum

Muchtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan meliputi juga lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan. Tujuan terciptanya hukum adalah keadilan, kepastian, dan ketertiban. Semua warga negara mendapatkan porsi yang sama dalam keadilan atau persamaan kedudukan, semua komponen masyarakat sudah tentu atau pasti diatur sesuai fungsinya masing-masing dan hendaknya dari pengaturan dan porsi yang sesuai akan menghasilkan kondisi yang tertib. Untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, maka Khairuddin mengirim beberapa ahli hukum untuk mempelajari undang-undang di kerajaan Turki Utsmani, Mesir, dan negara-negara Eropa mengingat hukum yang dipakai di Tunisia masih memakai dua mazhab sekaligus sehingga agak kesulitan dalam mengambil keputusan hukum. Peraturan dunia adalah prinsip yang kokoh demi tegaknya undang-undang agama. Ia adalah rahasia kemajuan dan peradaban karena aturan semacam ini mengharuskan stabilitas serta mendorong kemajuan dalam segala bidang; keilmuan, industri, dan pertanian. Undang-undang dasar

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.<sup>151</sup> Dengan hukum, kekuasaan akan diatur dan dibatasi.

---

<sup>151</sup> Marwan. Mas, "Tujuan Hukum" yang dikutip oleh Qyan (<http://one.indoskripsi.com>).

Hukum sangat erat hubungannya dengan kekuasaan. Tanpa kekuasaan hukum tidak dapat berjalan. Hukum dibuat, dijalankan, dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Pemerintah dalam hal ini majelis *shura* mempunyai peran besar dalam pembentukan hukum.

Berkaitan dengan hal di atas, Khairuddin menyamakan prinsip *shura* dengan demokrasi konstisional. Prinsip ini, lanjutnya, sangat mungkin diaplikasikan dalam “urusan politik secara umum” (melalui legislasi parlementer), atau pada “semua kebijakan eksklusif” melalui amanat kementerian; dan dia juga menggambarkan bagaimana prosedur ini dijalankan di Prancis.<sup>152</sup> Prinsip *shura* yang disamakan dengan demokrasi konstitusional dibantah oleh Muhammad Talbi dengan mengatakan, “Jika orang-orang melakukan penyelidikan hal-hal seperti itu mereka akan tahu ini akan terjadi: *Syura* tidak pernah demokrasi, untuk berbagai alasan; di antara mereka; Demokrasi tidak tampak di jalan peradaban Islam. Tidak ada kartu pemungutan suara, memilih, pemungutan suara, menggolongkan pemilih, dan sebagainya. Tidak ada yang pernah (dalam Islam)”.<sup>153</sup>

Menurut Khairuddin, hukum atau perundang-undangan Eropa tidak bertentangan dengan hukum Islam (Syariat) sehingga dia dapat mengkombinasikan antara hukum Islam dan hukum Eropa. Maka, pernyataan Khairuddin yang mengatakan bahwa peraturan-peraturan dunia (undang-undang palemen Eropa) adalah prinsip yang kokoh yang demi undang-undang negara sehingga terlihat bahwa undang-undang Eropa tersebut dapat mempengaruhi keberadaan Eropa. Melihat hal ini, dapat dikatakan bahwa Khairuddin tidak mempunyai kekakuan dalam mengambil sumber hukum. Selama hukum yang diambil dan diterapkan di dalam masyarakat atau negara memberikan tujuan yang baik dan sesuai dengan kondisi yang diinginkan maka tidak ada salahnya mengambil

<sup>152</sup> Black, *Op.Cit*, hal. 538.

<sup>153</sup> John Cooper, et. al., *Islam dan Modernity: Muslim Intellectuals Respond* (New York: J. B Tauris, 1998), hal. 138.

undang-undang parlemen Eropa untuk menjadi suatu rujukan hukum Tunisia.

Hukum Islam dan hukum Eropa (undang-undangan Eropa) mempunyai sumber rujukan yang berbeda. Hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadits juga pada Ijtihad atau Ijma' yang jika terjadi kesalahan atau kurangnya penjelasan mengenai hukum sesuatu maka umat Islam mengembalikannya pada Al-Quran dan Hadits. Al-Quran lebih terjaga kemurniaan atau keasliannya sehingga tidak ada keraguan dan penyimpangandi dalamnya dibandingkan dengan hukun Eropa yang hanya hasil dari akal pikiran manusia. Sedangkan hukum Eropa (undang-undang Eropa) merupakan murni hasil dari akal pikiran manusia sehingga jika ada kesalahan atau keraguan di dalamnya, mereka mengembalikan pada alasan logis atau rasional yang dapat diterima akal manusia. Maka jika terdapat penggabungan antara keduanya, hukum Islamlah yang akan menuntun hukum Eropa tersebut.

Sejarah dan kebudayaan Islam telah mempengaruhi Tunisia, tidak heran jika mayoritas penduduknya beragama Islam dan mempunyai Az-Zaituna sebagai basis Islam yang kokoh di mana syariat Islam begitu melekat seabad yang lalu. Jika membandingkan dengan latar belakang yang dimiliki Tunisia, maka penggabungan antara undang-undang Eropa dengan syariat menjadi sebuah alasan yang cukup mendasar bahwa pemikiran itu telah dicampur atau teracuk dengan liberal. Liberal merupakan akibat dari modernisasi dan westernisasi yang masuk ke Tunisia dan sarjana-sarjana Muslim seperti Khairuddin. Oleh karena itu, para ulama tidak akan pernah sepakat dengan penggabungan antara syariat dengan undang-undang Eropa di mana tidak ada hubungan atau keterkaitannya satu sama lain. Selain itu, ulama konservatif lebih merujuk pada hukum Islam dari pada pengaplikasiannya dengan hukum Eropa. Sebenarnya, di dalam hukum Islam segala sesuatunya telah terangkum dalam satu kesatuan hukum Islam seperti sifat dari Islam itu sendiri yang menyeluruh, maka hukum Islam sendiri pun ikut menyeluruh. Hanya saja

dalam mengkaji dan menyimpulkan sesuatu di dunia ini membutuhkan ketajaman pikiran, kritis, dan tidak mudah untuk menjudge sesuatu dengan cepat atau tergesa-gesa.

Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.<sup>154</sup>

Keberadaan hukum dalam sebuah negara adalah penting karena tujuan-tujuan yang hendak di capai dalam kehidupan masyarakat seperti keadilan, kepastian, dan ketertiban dapat terwujud. Tetapi, berjalan atau tidaknya hukum akan berpengaruh pada kekuasaan itu sendiri. Hukum memang memberi batasan dan mengatur kekuasaan itu sendiri agar tidak terjadi kesewenangan, namun lembaga-lembaga hukum juga harus menjadi independen dan tidak di bawah kontrol siapa pun sehingga lembaga tersebut mempunyai fungsi yang semestinya dan wibawa untuk menjalankan dan mempertahankan hukum tersebut. Hal ini jelas tidak terlihat dalam pemerintahan yang dijalankan oleh seorang Bey Tunisia. Lagi-lagi tidak adanya pembatasan kekuasaan dan tidak tunduknya penguasa terhadap hukum menjadikan lembaga hukum atau fungsi dari hukum yang dibuat oleh sebuah majelis menjadi tidak berarti. Ada kepentingan yang berpihak dalam mengontrol semua kegiatan masyarakat atau negara. Hukum yang tidak memberikan keadilan, kepastian, dan ketertiban membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi geram dan akhirnya dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, fungsi majelis syura harus benar-benar dijalankan agar proses konstitusi juga berjalan dengan baik yang nantinya akan menyentuh bidang-bidang lainnya yang ikut diatur dalam konstitusi itu sendiri.

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hal. 96.

### 3.3 Pemikiran di Bidang Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya mengatur. Ilmu oikonomos itu untuk menunjukkan ilmu yang menyelediki usaha-usaha manusia dalam memenuhi materiilnya<sup>155</sup>. Ekonomi berhubungan dengan produksi barang-barang kebutuhan.

Sejak masuknya imperialisme Eropa khususnya Prancis di Tunisia membawa paham baru dalam sistem perekonomian Tunisia yaitu sistem perekonomian kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lain.<sup>156</sup>

Sistem kapitalisme, menurut Ebenstein, mulai berkembang di Inggris pada abad ke-18 dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat laut dan Amerika Utara. Risalah terkenal Adam Smith, yaitu *The Wealth of Nations* (1776), diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan "laissez faire" dalam ekonomi. Bertentangan sekali dengan merkantilisme yaitu adanya intervensi pemerintah dalam urusan negara. Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara.<sup>157</sup> Lawan dari sistem kapitalisme adalah sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi di mana bagian terbesar kegiatan ekonomi dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu, Khairuddin mengambil kebijakan untuk membatasi monopoli perusahaan swasta yang memberikan keleluasaan pada sistem kapitalisme yang dibawa negara-

<sup>155</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Putrabardin, 2008, hal. 75.

<sup>156</sup> Husain. Heriyanto, *Kapitalisme: Sebuah Modus Eksistensi* (<http://media.isnet.org>).

<sup>157</sup> *Ibid.*

negara Eropa. Dalam sistem ekonomi, Khairuddin berpihak pada sistem sosialisme di mana bagian terbesar kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Tunisia bermatapencaharian sebagai petani, maka reformasi yang dilakukannya adalah mencari tahu kebutuhan dari para petani tersebut sehingga membangkitkan perekonomian rakyat. Petani sangat ditekan dengan pemberlakuan pajak pertanian. Oleh karena itu, Khairuddin mengambil kebijakan yang tidak pernah diambil oleh Bey-Bey Tunisia yaitu meringankan bahkan menghapus pajak yang tidak masuk akal untuk ukuran petani. Untuk mengejar ketertinggalan dan menyaingi hasil produksi pertanian dari negara-negara Eropa, Khairuddin melakukan pembinaan kepada para petani dalam pengelolaan lahan pertanian mereka dan pengenalan pada teknologi pertanian modern sehingga mereka tidak lagi menggunakan cara tradisional dalam mengolah lahan dan hasil produksi pertanian mereka.

Menurut Khairuddin, ada dua tiang negara yang bisa menjadi sebab kemunduran dan kemajuan negara. Kedua tiang itu dulu pernah ada di kerajaan Islam. Kedua tiang itu berkembang lalu berangsur-angsur redup dan hilang. Sedangkan kedua tiang itu dahulu tidak terdapat pada kerajaan di Eropa. Kemudian mereka memperbaiki kondisi. Kemajuan yang luar biasa dalam industri, pertanian, perdagangan dan semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan keadilan dan kebebasan.<sup>158</sup> Kemunduran yang dialami umat Islam pada abad ke-18 dan kemajuan yang sedang dialami Eropa dapat menjadikan pelajaran umat Islam. Kemunduran juga pernah dirasakan oleh Eropa, tetapi Eropa dapat mempelajari sebab-sebab kemunduran dan berusaha untuk memperbaiki kemunduran tersebut dengan prinsip keadilan dan kebebasan. Prinsip keadilan dan kebebasan pun tidak luput dari perubahan peristiwa-

---

<sup>158</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 209.

peristiwa sejarah yang dialami oleh Eropa. Dasar kekuatan dan kemakmuran Eropa bergantung pada keadilan dan kebebasan.<sup>159</sup>

Keadilan memainkan peran yang penting dalam diskursus Al-Quran: ia merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Tuhan, dan juga terhadap sesama manusia. Di samping itu, perintah menegakkan keadilan terkait kewajiban untuk menyeru pada kebaikan dan melarang kejahatan, dan juga terkait dengan keharusan bersaksi atas nama Tuhan.<sup>160</sup>

Kebebasan, menurutnya, terdiri dari dua aspek yaitu kebebasan personal dan kebebasan politik. Kebebasan personal meliputi kebebasan mutlak individu untuk mengatur dan melindungi diri, kehormatan dan hartanya serta persamaan bagi seluruh penduduk dalam hak dan kewajiban. Sedangkan kebebasan politik meliputi ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dan segala aktivitas perpolitikan.

Rakyat membutuhkan kebebasan dalam kaitannya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rakyat dan negara menjadi objek penderita dari monopoli dan kapitalisme itu sendiri. Khairuddin merasa bahwa rakyat perlu kebebasan dan keadilan dari Bey. Kebebasan individu untuk memperoleh harta benda dengan usaha masing-masing dan keadilan para penguasa sehingga kemajuan dan kemakmuranlah yang akan dirasa rakyat Tunisia. Sebagai orang yang pernah pahitnya orang yang tidak memiliki kebebasan ketika menjadi budak belian di Istanbul membuat Khairuddin menekankan pada kemakmuran rakyat dengan kebebasan dan keadilan itu sendiri.

Sebab kemunduran politik umat Islam sekarang ini adalah keterbelakangan ekonomi, yang menyebabkan kerugian dalam neraca pembayaran, sehingga berakibat pada ketidakmampuan untuk membeli perlengkapan militer yang dibutuhkan dalam peperangan. Tidak adanya pemasukan Tunisia dari masa kekuasaan Bey Muhammad Tunisia sampai tahun 1860an disebabkan karena tingginya pajak yang diberlakukan oleh

---

<sup>159</sup> Hourani, *Op. Cit*, hal. 90.

<sup>160</sup> El-Fadl, *Op. Cit*, hal. 29.

bey. Rakyat tidak mau memproduksi atau bertani disebabkan tingginya oajak itu sehingga kebutuhan mereka tidak terpenuhi karena alokasi pemasukan mereka diarahkan pada pembayaran pajak tersebut. Di sini, Khairuddin melakukan sebuah pembaharuan yang radikal yaitu menurunkan pajak pertanian dan menghapus pajak yang tidak masuk akal sehingga rakyat terdorong untuk bertani. Kekerasan yang sebelumnya dilakukan oleh koletor pajak dibubarkan karena jika rakyat ditekan dan tidak mempunyai kebebasan dalam hal ini maka perekonomian akan semakin memburuk yang pada akhirnya memberi dampak buruk bagi APBN Tunisia.

Sebenarnya, Khairuddin hanya melihat keadilan dan kebebasan yang menjadi dasar kekuatan dan kemakmuran Eropa dapat diterima dan diterapkan sepenuhnya di Tunisia. Tetapi jika campur tangan pihak asing yaitu Eropa khususnya Prancis justru akan memperparah kapitalisme atau monopoli yang diberikan oleh bey. Khairuddin menerima pemikiran tersebut tetapi tidak menyetujui adanya pemberian hak-hak istimewa bagi mereka. Namun, Khairuddin juga mengkritik Eropa terhadap tindak lakunya kepada negara-negara Islam. Terutama dalam hal “hak-hak istimewa bagi bangsa asing”, karena berpegang teguh kepada perjanjian-perjanjian yang lalu.<sup>161</sup> Mereka dapat memonopoli perdagangan di negara-negara Islam dengan perjanjian-perjanjian itu.

Bagi pembangunan perekonomian, peranan pemuda juga memiliki andil yang besar. Pemuda adalah generasi masa depan bangsa. Pembinaan terhadap pemuda untuk mengembangkan kerajinan Maghribi merupakan langkah baru yang berani diambil oleh Khairuddin. Belum pernah ada bey-bey Tunisia atau penguasa lokal lainnya memanfaatkan potensi sumber daya manusia anak negeri ini.

---

<sup>161</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 211.

### 3.4 Pemikiran di Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah aspek penting pula dalam membangun negara yang maju dan modern. Pendidikan menjadi dasar dalam meralisasikan atau membentuk generasi yang cerdas dan potensial. Institusi pendidikan dalam islam dikenal dengan nama madrasah. Di Timur Tengah institusi madrasah berkembang dan diselenggarakan pendidikan keislaman tingkat lanjut, setelah sekian waktu belajar di masjid-masjid atau *dar al-kuttab*. Di madrasah diajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, dan bahasa Arab.

Institusi-institusi pendidikan Eropa pada abad ke-18 merupakan institusi pendidikan modern pada saat itu. Pendidikan yang mempelajari ilmu pengetahuan modern, filsafat, hukum, dan lain sebagainya. Maka perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di eropa juga dapat diambil oleh umat Islam.

Umat Islam, lanjut Khairuddin, harus mempelajari ilmu pengetahuan dan ide-ide yang dikembangkan di Barat. Mengambil ilmu pengetahuan yang diciptakan di Barat tidaklah bertentangan dengan Islam. Menurutnya, Islam menganjurkan umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dari manapun ia berasal. Dia berpendapat bahwa berpegang teguh kepada agama Islam tidaklah mencegah orang untuk melihat dan mempertimbangkan apa yang terdapat pada bangsa-bangsa lain dan mengambil apa yang baik pada bangsa-bangsa itu dalam hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan yang bersifat duniawi.<sup>162</sup> Dia mengatakan, “hikmah adalah barang yang hilang dari orang mukmin yang harus dipungutnya di mana dan kapan saja ia menemukan hikmah itu”.

Khairuddin merasa perlu untuk menyebutkan hal ini karena ia masih melihat ada sebagian ulama tradisional yang masih melarang atau ragu-ragu terhadap pencapaian intelektual Barat. Dia berusaha keras menjustifikasi ilmu pengetahuan dari pihak asing sebagai ajaran Islam yang baik dan diperlukan untuk meningkatkan keadaan umat Islam

---

<sup>162</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 205.

Kontemporer. Pesan ini ditujukan terutama kepada ulama.<sup>163</sup> Dalam kaitannya dengan umat Islam khususnya ulama dengan ilmu pengetahuan Barat, Khairuddin mengatakan

“Mengapa kalian hanya membenci organisasi dan hasil yang diperoleh organisasi itu dan pemerintahannya dan pengaturannya, dan keadilan dan cara menegakkannya. Sedang kalian tidak membenci apa yang kalian gunakan untuk berlomba-lomba dalam pakaian yang indah-indah, alat-alat rumah tangga yang bagus-bagus, dan barang-barang yang baru dan alat-alat untuk kehidupan mewah yang diciptakan oleh negeri Barat? Orang-orang yang membuat senjata-senjata dan menciptakan ilmu dengan pelbagai macam cabangnya.<sup>164</sup>

Khairuddin berpendapat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan Eropa tidak lain karena mereka orang-orang yang berusaha mencari penyebab kemuduran sebelumnya. Kemudian mereka bangkit dengan mempelajari ilmu pengetahuan Islam. Kitab-kitab Ibnu Rusjd (Averroes, 1126-1198) umpamanya merupakan pelajaran wajib pada universitas di Paris. Al-Farabi (Alpharabius, meninggal tahun 950) sangat mempengaruhi St. Thomas Aquinas (1225-1274). St Thomas Aquinas merupakan seorang pemikir katolik yang kenamaannya telah meletakkan dasar-dasar segi kehidupan masyarakat katolik. Orang-orang Barat adalah orang-orang yang sangat terbuka dengan sesuatu atau hal yang baru, apalagi hal yang baru itu dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Menurut Khairuddin mengambil ilmu pengetahuan Barat dan mempelajarinya adalah mengambil sesuatu yang pernah dicuri atau diambil mereka dari umat Islam.

Oleh karena itu, Khairuddin mendirikan sebuah universitas modern bernama Sadiqi yang dirancang dengan kurikulum modern (Eropa). Sekolah yang berada dalam kontrol Prancis ini dapat memudahkan Prancis untuk semakin meng-*counter* pemikiran tentang sekularisme atau kebarat-baratan, sehingga pemuda atau pelajar-pelajar Tunisia jauh dari kehidupan yang Islami atau pemikiran yang Islami.

<sup>163</sup> Black, *Op. Cit.*, hal. 535.

<sup>164</sup> Ali, *Op. Cit.*, hal. 206.

Dalam bidang pendidikan, Khairuddin menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan modern. Di samping karena Tunisia berada dalam masa transisi modernisasi dan westernisasi, juga dominasi Eropa yang agresif dalam menyebarkan ide-ide dan metode-metode barunya di negara-negara Islam. Khairuddin tidak memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan karena dengan agama tidak menjadikan seorang Muslim menghalangi dia untuk mendapatkan hikmah di mana pun dia berada.<sup>165</sup>

### **3.5 Pengaruh Pemikiran Khairuddin At-Tunisi**

Perubahan radikal yang dilakukan sejumlah bey Tunisia dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Kondisi transisi tersebut memang sangat membutuhkan dukungan tenaga, materil, dan pikiran. Tenaga yang melibatkan seluruh elemen yang ada di Tunisia seperti pedagang besar maupun kecil, petani, ulama, dan lain-lain. Materil yang diutuhkan tidaklah kecil karena itu butuh inovasi yang luar biasa untuk mendatangkan atau menambah pemasukan untuk sokongan perubahan tersebut. Juga beban oikiran yang membuat rakyat dan negara menderita akibat dari berbagai macam perubahan peristiwa itu. Rancangan yang tidak hanya membutuhkan waktu satu atau dua tahun, tetapi bisa belasan atau puluhan tahun.

Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern sudah di mulai dari pemerintahan Bey Ahmad Pasya bahkan ketika masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Rencana reformasi atau perbaikan yang dilakukan oleh sederet bey Tunisia tidak membawa masyarakat Tunisia kepada kemakmuran dan kemodernan yang hendak diusung, melainkan membawa dampak yang sangat buruk bagi pemerintahan juga rakyat. Pemerintah hanya melakukan kebijakan menaikkan pajak pertanian dan memberikan izin monopoli pada negara-

---

<sup>165</sup> Peneliti mendapatkan sumber dari Kedutaan Besar Tunisi di Jalan Karang Asem, Jakarta.

negara Eropa. Pemerintah tidak berusaha untuk membina dan mengembangkan perekonomian yang berbasis pada pertanian.

Barulah, reformasi yang dilakukan oleh Khairuddin al-Tunisi terasa mengalami kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Tunisia. Khairuddin melakukan reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, gairah perekonomian Tunisia mulai bangkit. Angka penggarap lahan pertanian meningkat karena adanya pembinaan dalam pengelolaan lahan pertanian juga terbentuknya upah minimum. Upaya penanaman kembali pohon zaitun dan kurma ketika Khairuddin menjabat sebagai ketua Komite Keuangan, maka hal ini membuat Tunisia dibanjiri pengembangan pohon zaitun dan kurma. Dengan menanam pohon zaitun dan kurma, rakyat terbebas dari pajak selama 20 tahun.

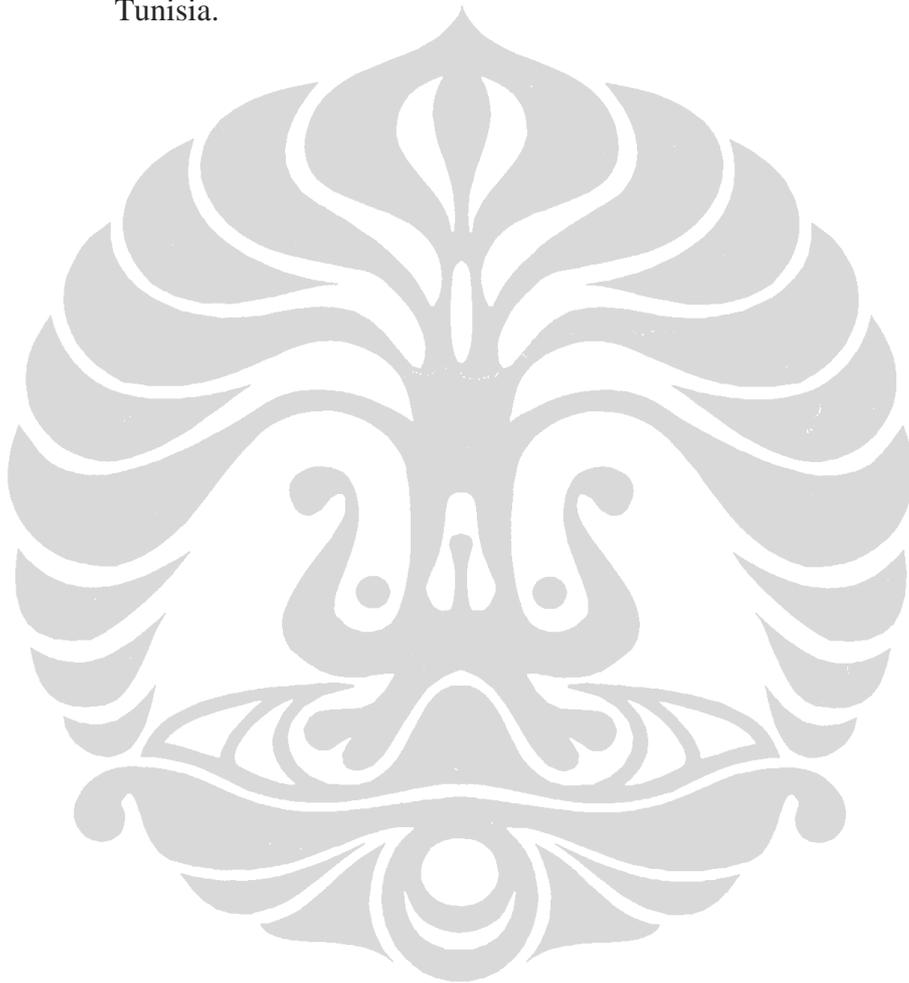
Dalam bidang pendidikan, didirikan Universitas Sadiqi kelak menjadi basis berdirinya pergerakan pemuda Tunisia. Organisasi nasionalis pertama tahun 1880 di Tunisia yang masih dalam kekuasaan Protektorat Prancis. Dari lulusan universitas ini juga didirikan sebuah sekolah Khalduniyya.<sup>166</sup> Ini terlihat bahwa penekanan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan modern yang diusung oleh Khairuddin benar-benar dirasakan dan dinilai penting pula oleh para pemuda atau generasi muda Tunisia. Ilmu pengetahuan menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan yang nantinya dapat membawa kemajuan bagi Tunisia sendiri. Juga tidak memandang ilmu pengetahuan Barat sebagai hal yang negatif yang perlu ditolak oleh umat Islam.

Demokrasi yang menekankan pada konstitusi, tidak berjalan dengan baik karena Tunisia terlebih dahulu dijajah oleh Prancis selang beberapa tahun pengunduran diri Khairuddin sebagai PM Tunisia yang ke-2. Reformasi yang dilakukan oleh Khairuddin dalam bidang politik tidak begitu memberikan dampak positif bagi perkembangan demokrasi di negara-negara Islam.

---

<sup>166</sup> Stearn, *Op. Cit*, hal. 550.

Pendayagunaan media ketika Khairuddin menjabat sebagai PM memberi pengaruh yang tidak sedikit bagi perkembangan media cetak. Surat kabar Al-Ra'id Al-Tunisi yang diterbitkan oleh Khairuddin juga diikuti dengan terbitnya surat kabar Al-Hadira.<sup>167</sup> Membenahi percetakan dan menerbitkan buku-buku yang berisi ilmu dan sastra memberikan pengaruh positif dalam perkembangan ilmu dan sastra di Tunisia.



---

<sup>167</sup> *Ibid.*